



REHABILITASI PENGEMIS DI KOTA PEMALANG

(Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Rizki Amalia

3301409037

POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

hari :

tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ngabiyanto, M.Si

Drs. At Sugeng Priyanto, M.Si

NIP. 196501031990021001

NIP. 196304231989011002



Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Slamet Sumarto, M. Pd.

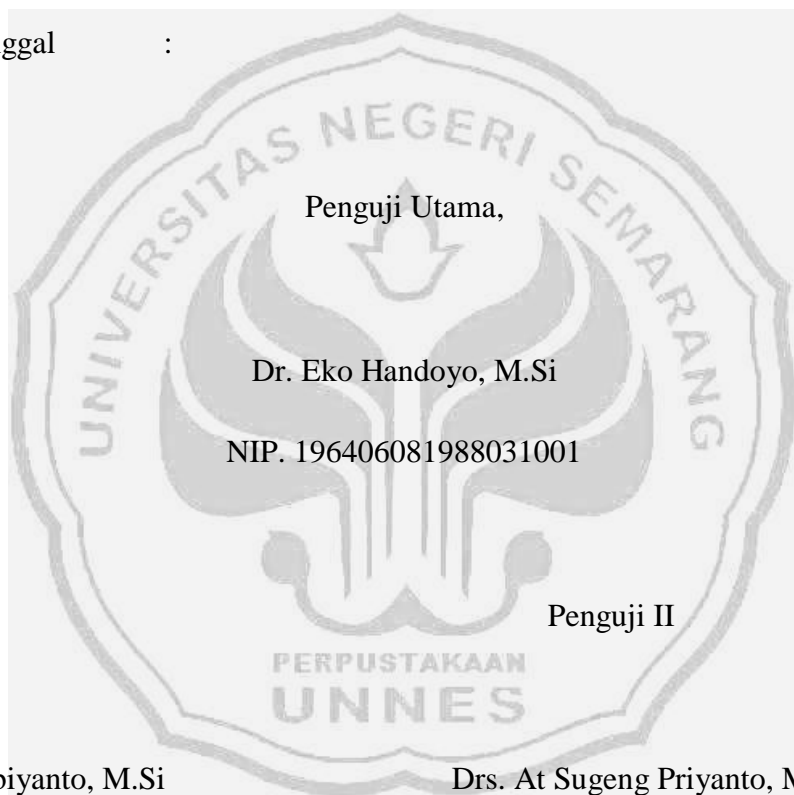
NIP. 196101271986011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :



Mengetahui:

Dekan

Drs. Subagyo, M.Pd

NIP. 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al-Insyirah: 6).
- Usaha tanpa doa adalah sombong, sedangkan doa tanpa usaha adalah omong kosong.
- Ada harapan bagi yang berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha (Andi Arsyil Rahman).

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

- Allah S.W.T., terima kasih atas segala kemudahan dan bimbingan yang telah Engkau berikan dalam hidup hamba.
- Bapak dan Ibu, terimakasih atas kasih sayang, motivasi, nasihat dan doa yang diberikan selama ini.
- Adikku Muhammad Faahim Abror, saudara kecilku Muhammad Haris Al-Aziiz dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat, serta membantu penulis dalam *refresh* pikiran ketika penat.
- Teman-teman Sri Hardy Cost, Marta, mbak Isma, mbak Santi, Citra, Ida, Arum, Yuni, Neli yang selalu menemani dan menjadi penyemangat bagi penulis.
- Teman-teman penulis, Dina, Tyas, Rio, Santi, Ninik, Khawamirza, Rindang, Ana, Nana, Iim, Dewi terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
- Almamaterku khususnya jurusan Politik dan Kewarganegaraan Prodi Pendidikan dan Kewarganegaraan angkatan 2009.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rehabilitasi Pengemis di Kota Pemalang (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I)”.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Eko Handoyo, M.Si., Dosen Penguji Utama.
5. Drs. Ngabiyanto, M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Drs. At Sugeng Priyanto, M.Si., Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran dan ketekunan telah memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap pegawai Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I, terutama Bapak Agus Aprijanto, Bapak Ngadino, Bapak Wardi’in, Ibu

Rustinawati, Ibu Umi Fatmiyati, Ibu Diah Rakantingsih yang telah memberikan ijin penelitian dan telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

8. Segenap Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penelitian.
9. Bapak Supadi staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Pemalang yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penelitian.
10. Bapak Kadir Rusman dan Bapak Sumar staf Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang yang telah membantu dalam memberikan informasi dalam penelitian.
11. Dan semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah penulis kerjakan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pembaca.

Semarang, Juli 2013

Penulis

SARI

Amalia, Rizki. 2013 *Rehabilitasi Pengemis di Kota Pemalang (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I)*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Ngabiyanto, M.Si., Pembimbingan II Drs. At. Sugeng Priyanto, M.Si. 117 hlm.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Pengemis

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Kemiskinan sebagai suatu kondisi kekurangan sosial ekonomi adalah persoalan yang masih ada di depan mata. Hal itu merupakan gejala penyakit sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial yang disebut sebagai patologi sosial. Sekokoh apapun suatu bangsa, jika masyarakatnya mengalami kemiskinan akan rapuh dan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Mereka mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup entah menjadi pemulung, pengamen, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Dalam keadaan tersebut pengemis kebanyakan menjadi bagian integral dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam hal ini perlindungan sosial menjadi sarana penting untuk meringankan dampak tersebut. Pemerintah bertekad untuk menanggulangi pengemis yang tersebar di tanah air sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Karena tindakan pengemis merupakan perbuatan pelanggaran tindak pidana.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengemis di kota Pemalang, (2) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I, (3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial " Samekto Karti" Pemalang I untuk merehabilitasi pengemis.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah (1) faktor internal dan faktor eksternal penyebab munculnya pengemis, (2) sejauh mana keterlibatan dan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pengemis, (3) upaya yang dilakukan dari Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I dalam merehabilitasi pengemis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I dan petugas Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti". Informan pendukung adalah staf Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, dan Masyarakat. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis yang terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor internal penyebab terjadinya pengemis berkaitan dengan kondisi diri sang peminta-minta yang meliputi sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, cacat fisik

maupun psikis. Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya pengemis-an berkaitan dengan kondisi luar dari sang peminta-minta yang meliputi faktor sosial, kultur, ekonomi, pendidikan, lingkungan dan agama. Faktor lain dikarenakan kurang efektifnya kegiatan penjangkaran yang dilakukan Satpol PP sehingga belum sepenuhnya terkena razia. Penyebab lain karena adanya buangan pengemis-pengemis dari luar daerah ke Pemalang yang menyebabkan mereka beroperasi di daerah Pemalang, (2) keterlibatan dan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pengemis-an di Balai Rehabilitasi berupa pemberian bantuan berupa sandang dan pangan berupa sembako serta bimbingan ketrampilan maupun bimbingan fisik, pemberian bantuan pertolongan oleh masyarakat manakala kelayan Balai mengalami musibah, memberikan pelatihan Usaha Ekonomi Produktif melalui kegiatan bimbingan dan latihan ketrampilan bagi eks PGOT, (3) upaya-upaya yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I dalam merehabilitasi pengemis adalah dengan melakukan: a) rehabilitasi perilaku yang merupakan proses rehabilitasi sosial melalui pelayanan perubahan perilaku melalui pendidikan bela Negara, bimbingan mental pembinaan keagamaan, dinamika dan terapi kelompok, b) rehabilitasi sosial psikologi yang merupakan proses rehabilitasi sosial yang berusaha mengembalikan kondisi mental psikologi dan sosial, c) rehabilitasi karya merupakan proses rehabilitasi sosial yang berusaha agar sasaran penanganannya dapat menjadi manusia produktif dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, d) rehabilitasi pendidikan merupakan proses rehabilitasi sosial yang berusaha mengupayakan penambahan pengetahuan melalui *upgrading* dan *refreshing* untuk mendukung pengambilan bentuk jenis ketrampilan.

Saran yang dapat dikemukakan penulis antara lain: (1) jumlah tenaga ahli profesional bidang pekerja sosial dapat ditambahkan lagi agar penyampaian materi oleh petugas dapat disesuaikan dengan bidang keahliannya, selain itu dana operasional sebaiknya juga digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Balai yang dirasa belum terpenuhi, lebih meningkatkan keragaman ketrampilan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” agar penerima manfaat mempunyai bekal ketrampilan yang lebih memadai dan berguna, (2) bagi penerima manfaat, bahwa pelatihan dan bimbingan yang diberikan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” harus dijadikan motivasi bagi penerima manfaat untuk lepas dari masalah sosial yang pernah dialami, (3) bagi masyarakat, penulis mengharapkan agar masyarakat lebih ikut berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi pengemis yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi sosial “Samekto Karti” Pemalang I agar upaya rehabilitasi yang diberikan kepada penerima manfaat dapat berjalan lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	
1. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	

1. Masalah Sosial	13
2. Kemiskinan dan Pengemis	16
3. Pandangan Hidup dan Budaya Kemiskinan	20
4. Pengemisan Menurut Perspektif Hukum Pidana	27
5. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Dasar Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Sumber Data Penelitian	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Uji Validitas Data	41
G. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
a. Sejarah Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” ...	47
b. Visi dan Misi	49
c. Profil Petugas	51
d. Profil Penerima Manfaat	53
e. Sarana dan Prasarana	56
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengemisan di Kota Pemalang.....	57
a. Faktor internal.....	60
b. Faktor Eksternal	62
3. Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Pengemisan di Balai Rehabilitasi Sosial ”Samekto Karti” Pemalang I	65
4. Upaya-Upaya Rehabilitasi Pengemis oleh Balai Rehabilitasi Sosial ”Samekto Karti” Pemalang I Untuk Merehabilitasi Pengemis	

	a. Jenis Pelayanan	73
	b. Mekanisme Kerja Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I	77
	c. Kinerja Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I dalam Upaya Rehabilitasi Pengemis	89
	d. Hasil yang dicapai dari Pelayanan Rehabilitasi Pengemis.....	95
	B. PEMBAHASAN	
	1. Faktor Penyebab Terjadinya Pengemisan.....	101
	2. Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Pengemisan di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I	104
	3. Upaya-Upaya yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I.....	107
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	112
	B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN		

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Kerangka Berpikir Penelitian	31
Bagan 2.	Skema Alur Kegiatan Analisis Data.....	45
Bagan 3.	Mekanisme Kerja Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Informan Subjek Penelitian.....	37
Tabel 2.	Petugas di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”	51
Tabel 3.	Penerima Manfaat (PGOT) Berdasarkan Pendidikan	54
Tabel 4.	Penerima Manfaat (PGOT) Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 5.	Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pemalang Tahun 2012.....	65
Tabel 6.	Data Purna Bina Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti Pemalang I.....	95
Tabel 7.	Daftar Nama Peserta Kegiatan Penjaringan dan Pendampingan Bagi eks PGOT dan Kelompok Rentan Lainnya Kabupaten Pemalang Tahun 2013	99
Tabel 8.	Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I....	48
Gambar 2. <i>Cottage</i> Tempat Tinggal Penerima Manfaat	56
Gambar 3. Kegiatan Pembinaan Etika dan Moral di Aula Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”	75
Gambar 4. Kegiatan Menjahit di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”	85
Gambar 5. Kegiatan Membuat Kerajinan Tangan (tas dan keset kain perca) di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”	86
Gambar 6. Kegiatan Pertanian dan Perkebunan	87
Gambar 7. Kegiatan Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Bagi eks PGOT	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang

Penanggulangan Gelandangan dan pengemisan

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

Lampiran 5. Surat Tanda Terima Pemberitahuan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Satu dua abad yang lalu, orang menyebut satu peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik. Kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian, dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tadi dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas. Gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial disebut sebagai patologi sosial. Para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal (Kartono, 2007:1).

Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia walaupun, sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Seringkali pemikiran-pemikiran dan diskusi-diskusi yang telah diadakan mengenai kemiskinan lebih banyak menekankan segi-segi emosional dan perasaan yang diselimuti oleh aspek-aspek moral dan kemanusiaan, atau juga bersifat partisan karena berkaitan dengan alokasi

sumberdaya, sehingga pengertian mengenai hakikat kemiskinan itu sendiri menjadi kabur. Akibatnya adalah sebagai usaha penanggulangan masalah kemiskinan menjadi bersifat sebagian-sebagian atau tidak menemui sarannya secara tepat.

Kemiskinan sebagai suatu kondisi kekurangan sosial ekonomi adalah persoalan yang masih selalu ada di depan mata, persoalan ini merupakan bahaya yang dapat mengancam masyarakat di negara ini. Sekokoh apapun suatu bangsa, jika masyarakatnya mengalami kemiskinan akan rapuh dan menimbulkan persoalan-persoalan baru lagi. Hal ini dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4 yang berbunyi: “Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Masih banyaknya *disadvantage groups* (kelompok masyarakat kurang beruntung) di tengah-tengah masyarakat Indonesia menuntut keterlibatan profesi pekerja sosial (*social worker*) dalam menanganinya. *Disadvantage groups* ini – atau biasa juga disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS – adalah mereka yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya (*social function*) sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Misalnya, orang miskin, anak-anak terlantar, pengemis, anak jalanan, anak/wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, lanjut usia terlantar, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan lain sebagainya.

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional (Suharto, 2009:3). Dalam arti luas, perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko.

Perlindungan sosial sendiri menjadi saran penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin. Namun demikian, perlindungan sosial bukan merupakan satu-satunya pendekatan dalam strategi penanggulangan kemiskinan (Suharto, 2009:3). Guna mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan, dalam pelaksanaannya strategi ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain, seperti penyediaan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan secara terintegrasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, terdapat orang-orang yang tersingkirkan yang berdampak pada terjadinya pengemisan. Orang-orang yang tersingkirkan inilah yang kemudian mencoba segala upaya untuk tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya entah menjadi pemulung, pengamen, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Pada umumnya mereka berusia muda dan masih produktif namun mereka kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Sesuai kemajuan perkembangan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial menunjukkan bahwa kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat semakin meningkat sehingga peran serta dalam menangani masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat, namun pengelolaan dan pelayanannya belum semua dilaksanakan secara profesional.

Pemerintah telah bertekad untuk menanggulangi pengemis yang telah tersebar di seluruh tanah air. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, Pemerintah pusat sangat berharap kepada pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar untuk ikut serta memprakarsai secara langsung tanpa harus menunggu kebijakan dan komando program-program formal dari pemerintah pusat. Ironinya, banyak pihak yang mencibir dan mencitrakan negatif terhadap keberadaan pengemis itu sendiri. Pengemis dianggap mengganggu ketertiban, keamanan, dan keindahan kota. Padahal, Indonesia yang menganut faham negara yang menyejahterakan rakyat mestinya bertanggung jawab akan masalah tersebut.

Pengemis menjadi bagian integral dalam tata kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Kota Pemalang. Fenomena pengemis dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlahnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, jumlah pengemis di Kabupaten Pemalang pada periode tahun 2012 tercatat 263 orang. Terdiri dari laki-laki 143 dan perempuan 120 orang (sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Mereka juga mempunyai tempat favorit tersendiri dalam melakukan aksinya. Umumnya mereka melancarkan aksinya di pasar, terminal, stasiun, alun-alun, dan lain sebagainya.

Keberadaan pengemis itu sendiri tidak hanya bermasalah terhadap keamanan, ketertiban dan keindahan kota, melainkan juga masalah keadilan, pemerataan, dan persoalan hak asasi kemanusiaan.

Tindakan pengemisian merupakan perbuatan pelanggaran tindak pidana. Hal ini tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Ketiga Bagian Pelanggaran Bab II Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum Pasal 504 (1) yang berbunyi: “Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisian, dengan kurungan paling lama enam minggu”.

Banyaknya landasan hukum yang mengatur mengenai masalah kesejahteraan pengemis dan masih banyaknya pengemisian di wilayah Kota Pemalang sangat tinggi, salah satu usaha dari pemerintah dalam menanggulangi pengemisian salah satunya dengan adanya Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I yang menangani dan memberikan binaan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan masyarakat lingkungan PMKS/PGOT daerah rawan masalah PGOT maka penulis tertarik untuk meneliti pengemisian di Kota Pemalang serta upaya-upaya rehabilitasi pengemis yang dilakukan sesuai dengan landasan hukum yang ada. Atas dasar itulah peneliti bermaksud menyusun skripsi dengan judul “REHABILITASI PENGEMIS DI KOTA PEMALANG (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengemisan di Kota Pemalang?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan pengemisan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I untuk merehabilitasi pengemis?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dapat disampaikan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengemisan di Kota Pemalang .
- b. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan pengemisan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I untuk merehabilitasi pengemis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, baik secara teoritis ataupun secara praktis antara lain:

1. Manfaat Teoretis

- a. Sebagai penelitian awal dan bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan apabila dilakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan rehabilitasi pengemis, terutama kegiatan layanan sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengetahui peran dari pihak-pihak yang ikut serta dalam rehabilitasi pengemis di Kota Pematang Siantar.
- b. Bagi pihak pemerintah dan lembaga sosial ialah dapat menghasilkan sebuah panduan dalam menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bahan pertimbangan penanganan rehabilitasi pengemis di Kota Pematang Siantar.

E. Batasan Istilah

Untuk memperjelas pengertian yang terkandung dalam judul penelitian diatas, maka akan penulis kemukakan arti daripada judul tersebut dengan maksud memberikan gambaran secara jelas. Adapun penjelasan judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyuluhan kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

Rehabilitasi adalah mengembalikan kemampuan yang pernah dimilikinya, karena suatu hal musibah ia harus kehilangan kemampuannya, kemampuan yang hilang inilah yang dikembalikan seperti semula yaitu seperti kondisi sebelum terjadi musibah yang dialami.

2. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (PP No.31 Tahun 1980).

3. Rehabilitasi Pengemis

Rehabilitasi pengemis adalah upaya membantu memulihkan kembali kehidupan normal pengemis ke lingkungan keluarga, membantu mengembalikan kepercayaan diri para pengemis kepada keluarga

maupun masyarakat dan kecintaan terhadap kerja melalui bimbingan mental, spiritual, sosial, fisik, keterampilan, dan resosialisasi yang ada di Kota Pemalang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang rehabilitasi sosial sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil dari penelitian terdahulu membantu peneliti memperoleh gambaran tentang rehabilitasi sosial dari berbagai latar belakang permasalahan dan membantu agar penelitian ini menjadi lebih baik serta sebagai pedoman bagi peneliti.

Penelitian pertama tentang rehabilitasi sosial dilakukan oleh Yogie Firmansyah (2012) tentang *Peran Unit Rehabilitasi Sosial "KARYA MANDIRI" Kabupaten Pemalang dalam Pemerataan Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah* menjelaskan tentang peran Unit Rehabilitasi Sosial Karya Mandiri Kabupaten Pemalang dalam pemerataan pendidikan bagi anak putus sekolah, proses pembelajaran yang ada di Unit Rehabilitasi Sosial Karya Mandiri, pendorong dan penghambat Unit Rehabilitasi Sosial Karya Mandiri. Melalui kegiatan rehabilitasi, penerima manfaat mengenal pemulihan harga diri, percaya diri, kecintaan kerja dan kesadaran, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, maupun lingkungan masyarakat dan sosialnya. Peran unit dalam mendidik dilakukan dengan memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan formal bagi penerima manfaat melalui layanan pendidikan gratis diharapkan agar penerima manfaat dapat mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya dan semuanya dibiayai oleh pemerintah. Jadi, Unit Rehabilitasi Sosial Karya Mandiri

berperan sebagai pelayanan kesejahteraan sosial di bidang pendidikan yang tujuannya membantu mengurangi jumlah angka anak putus sekolah di Kabupaten Pemalang.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Muryani (2008) tentang *Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa proses rehabilitasi yang dilakukan Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta bagi gelandangan sangat dibutuhkan. Untuk mencapai upayanya untuk menangani masalah rehabilitasi sosial terhadap gelandangan, diberikan bimbingan didalam panti agar mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Dengan bimbingan tersebut akan menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial, keterampilan kerja mereka dibina untuk menjadi terampil dan keterampilan ini juga untuk masa depan setelah mereka keluar dari panti.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Dandung Budi Yuwono tentang *Pengemis dalam Ruang Sosial Muslim* yang menjelaskan tentang sejarah terjadinya komunitas pengemis dan bagaimana komunitas tersebut memaknai kehidupan sebagai pengemis, hubungan dan upaya yang dilakukan komunitas agama dalam melepas komunitas pengemis dari kehidupan pengemis, dan melihat berbagai tindakan yang dilakukan komunitas pengemis dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Penelitian-penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang rehabilitasi sosial. Selain sama-sama mengkaji rehabilitasi sosial, terdapat

satu penelitian yang menunjukkan persamaan kaitannya dengan peran dari balai rehabilitasi sosial dalam proses rehabilitasi sosial berupa pemberian pelayanan terhadap penerima manfaat. Penelitian tersebut dilakukan oleh Tri Muryani dengan judul *Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta*.

Perbedaan terletak pada fokus dan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Yogie Firmansyah memfokuskan pada lembaga sebagai sasaran penelitian yaitu Unit Rehabilitasi Sosial Karya Mandiri yang merupakan unit rehabilitasi sosial yang bertujuan memberikan layanan pendidikan gratis bagi anak putus sekolah yang umumnya diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Muryani memfokuskan pada proses rehabilitasi sosial bagi gelandangan berupa pelayanan bagi gelandangan dan untuk mengetahui proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Karya. Penelitian oleh Dandung Budi Yuwono memfokuskan pada latar belakang terjadinya komunitas pengemis yang menyejarah yang berlangsung relatif lama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara komunitas agama dengan komunitas pengemis. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Yogie Firmansyah, Tri Muryani, dan Dandung Budi Yuwono berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini.

B. Landasan Teori

1. Masalah Sosial

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial mencakup pengertian yang luas, karena bukan hanya mencakup permasalahan-permasalahan kemasyarakatan tetapi juga mencakup permasalahan didalam masyarakat yang berhubungan dengan gejala-gejala abnormal di dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya masalah sosial merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya.

Robert K. Merton dan Kingsley Davis mengemukakan, masalah sosial adalah suatu cara bertingkah laku yang menentang satu atau beberapa norma yang telah diterima dan berlaku di dalam masyarakat. Masalah sosial berhubungan dengan dua unsur yaitu tingkah laku yang menentang atau menyimpangan (*deviance*) dan norma masyarakat. Dengan kata lain masalah sosial adalah masalah-masalah yang terbatas dalam keluarga, namun dalam perubahan tingkah laku individunya memerlukan masyarakat agar dapat meneruskan fungsinya. Menurut Daldjuni (1985) dalam Abdulsyani, bahwa masalah sosial adalah suatu kesulitan atau ketimpangan yang bersumber dari dalam masyarakat sendiri dimana masyarakat biasanya berorientasi dan membutuhkan pemecahan dengan segera, dan sementara itu orang masih percaya akan masih dapatnya masalah itu dipecahkan. Dengan demikian, berarti masalah sosial itu berkisar dari suatu keadaan ketidakseimbangan antara unsur nilai-nilai dan norma-norma sosial

dalam masyarakat yang relatif membahayakan atau menghambat anggota-anggota masyarakat dalam usahanya mencapai tujuan.

Suatu masalah sosial yaitu tidak adanya persesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial. Unsur-unsur yang pertama dan pokok masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi-kondisi yang nyata kehidupan. Artinya, adanya kepincangan-kepincangan antara anggapan-anggapan masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dalam kenyataan pergaulan hidup (Soekanto, 2006:316). Masalah sosial akan terjadi apabila kenyataan yang dihadapi oleh warga masyarakat berbeda dengan harapannya, hal ini menyangkut persoalan yang terjadi pada proses interaksi sosial.

Sumber-sumber masalah sosial dapat timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, biologi, dan kebudayaan. Masalah-masalah sosial dapat berupa: masalah kemiskinan, kejahatan, masalah generasi muda, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup. Departemen Kesehatan pada Seminar Nasional II Badan Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (BPKJM), dr. Pranowo Sosrokoesoemo (Kompas 1987) mengemukakan, terdapat 12 masalah utama bidang sosial yaitu: korban pemasungan, psikotik gelandangan, kenakalan remaja, retardasi mental, penyalahgunaan narkotika, keretakan rumah tangga, psikogeriatrik, prostitusi, epilepsi, psikoseksual, putus sekolah, percobaan bunuh diri.

Masalah-masalah diatas pada mulanya menggambarkan masalah individual, kemudian menjadi masalah-masalah sosial. Disamping itu masalah-masalah sosial juga dapat ditimbulkan oleh lingkungan baik fisik, mental maupun sosial. Timbulnya masalah sosial daapt disebabkan oleh lima hambatan yaitu ketergantungan ekonomi, ketidakmampuan menyesuaikan diri, kesehatan yang buruk, kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi, serta kondisi sosial dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang baik.

Menurut Daldjuni (1985) dalam Abdulsyani, bahwa masalah sosial dapat bertalian dengan masalah alami ataupun masalah pribadi, maka secara menyeluruh ada beberapa sumber penyebab timbulnya masalah sosial, antara lain:

- a. faktor alam. Ini menyangkut gejala menepisnya sumber daya alam. Penyebabnya dapat berupa tindakan overeksploitasio oleh manusia dengan teknologi yang makin maju, dapat pula karena semakin banyaknya jumlah penduduk yang secara otomatis cepat menipiskan persediaan sumber daya.
- b. faktor biologis. Ini menyangkut bertambahnya manusia. Pemandahan manusia yang dapat dihubungkan pula dengan implikasi medis dan kesehatan masyarakat umum serta kualitas masalah pemukiman, baik di pedesaan atau di perkotaan.
- c. faktor budayawi. Ini berkaitan dengan keguncangan mental dan bertalian dengan beraneka ragam penyakit kejiwaan. Pendorongnya adalah perkembangan teknologi.
- d. faktor sosial. Ini menyangkut dengan berbagai kebijaksanaan ekonomi dan politik yang dikendalikan bagi masyarakat.

Dari berbagai sumber masalah sosial itu pada umumnya pernah, sedang atau mungkin akan dialami oleh setiap manusia dan masyarakat.

2. Kemiskinan dan Pengemis

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto. 2006:320). Menurut Emil Salim (1984) dalam Abdulsyani, bahwa kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Kemiskinan juga sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri hidup didalam kemiskinan. Kesadaran akan hidup dalam kemiskinan yang mereka sadari baru terasa ketika mereka membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.

Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1984:12). Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka didalam masyarakat yang berstrata kelas, individualistis, dan berciri kapitalisme. Kebudayaan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan. Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama masyarakat, merupakan salah satu ciri terpenting kebudayaan kemiskinan. Hal ini merupakan masalah yang rumit dan merupakan akibat dari ekonomi dan diskriminasi. Namun partisipasi terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan tidak serta merta dapat menghapuskan kebudayaan kemiskinan itu sendiri. Jadi inti dari kebudayaan adalah fungsi adaptasinya yang positif.

Perbedaan antara kemiskinan dan kebudayaan kemiskinan adalah dasar bagi model yang dikemukakan. Ada banyak tingkat-tingkat kemiskinan dan jenis-jenis kemiskinan. Kebudayaan kemiskinan menunjuk kepada adanya suatu cara hidup yang secara bersama dialami dan dilakukan oleh orang-orang miskin. Apapun jenis kebudayaan orang miskin, kebudayaan tersebut tidak akan mengurangi kemampuan mereka untuk dapat memanfaatkan kesempatan yang lebih baik dalam usaha memperoleh sumber daya ekonomi untuk mereka.

Dampak dari kemiskinan tersebut kemudian menimbulkan gejala-gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan adalah persoalan gelandangan dan pengemis. Persoalan ini merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (PP No. 31 Tahun 1980). Istilah pengemis mengingatkan kita pada anggota masyarakat yang tidur di kaki lima, yang sehari semalam di emperan pasar dan toko, meminta sedekah pada orang-orang yang naik mobil ketika berhenti di perempatan jalan, wanita yang menggendong bayi dengan membawa tempat atau plastik kotor yang disodorkan kepada siapa saja di jalan-jalan. Berbagai macam pekerjaan memang dilakukan para pengemis tersebut, hanya apa yang mereka kerjakan tidak layak menurut kemanusiaan. Hal ini dapat digambarkan bagaimana pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, disebutkan bahwa pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya pengemis, serta bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga Negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, usaha-usaha dalam upaya penanggulangan pengemis sebagai berikut:

- a. usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya pengemis. Usaha tersebut meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pengemisan, sehingga akan mencegah terjadinya pengemisan oleh individu yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya; meluasnya pengaruh dan akibat adanya pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya; pengemisan kembali oleh pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.
- b. usaha represif adalah usaha-saha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud untuk mengurangi dan/atau meniadakan

pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pengemis. Usaha represif ini meliputi: razia, penampungan sementara untuk diseleksi, pelimpahan.

- c. usaha rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir terhadap pengemis melalui usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

3. Pandangan Hidup dalam Budaya Kemiskinan

Manusia merupakan satu kesatuan hidup. Meskipun manusia dapat dipandang dari berbagai segi, seperti pandangan yang meninjau sebagai makhluk biologis, psikologis, ekonomis, sosial, dan budaya. Namun manusia tetap dipandang sebagai kesatuan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan di mana berbagai unsur satu dengan yang lainnya saling melengkapi sebagai kesatuan utuh.

Manusia sebagai suatu makhluk hidup yang sama dengan makhluk-makhluk lainnya, harus tunduk dan dapat menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku. Apabila hukum ini tidak dapat berlangsung sebagai mana mestinya, maka organisme itu akan mengalami kegagalan. Artinya apabila hukum itu berlaku pada manusia, maka ia akan mati sebagai individu maupun sebagai jenis kehidupan. Oleh karena itu manusia mempunyai anatomi yang umum sifatnya, tidak memiliki kemampuan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan seperti halnya binatang.

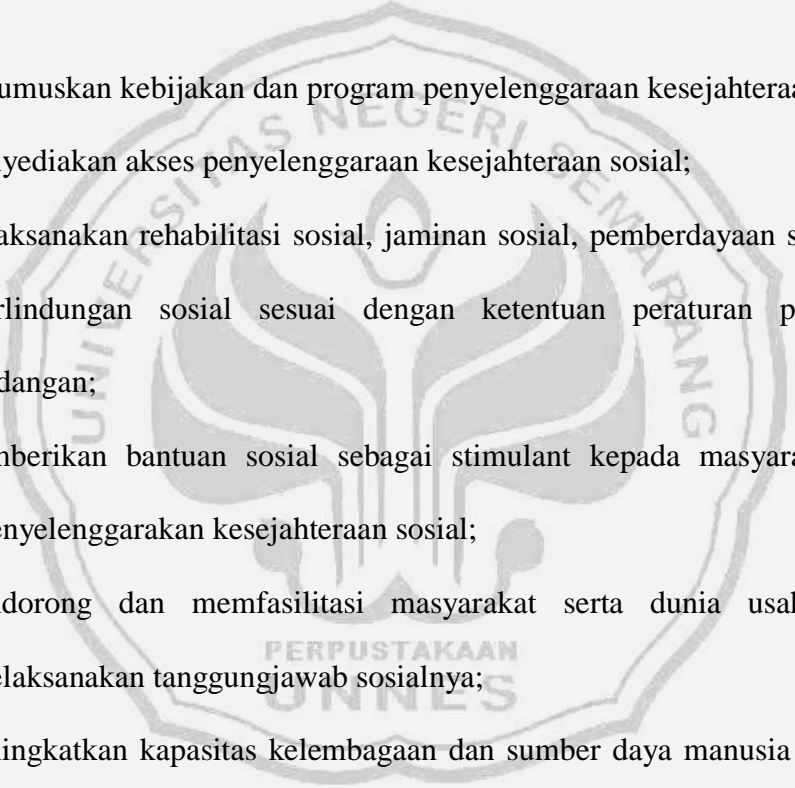
Pandangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari bayang-bayang Pancasila yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia digunakan sebagai dasar mengatur kehidupan Negara kita. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang mengenai tata kehidupan bernegara harus didasarkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia digunakan sebagai penuntun, petunjuk, dan pedoman hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang harus mencerminkan semua sila dari Pancasila.

Rasa putus asa dan tanpa adanya harapan untuk hidup layak dalam budaya kemiskinan mempengaruhi pandangan hidup mereka sendiri. Hal ini dikarenakan adanya faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah, yang berdampak pada minimnya keterampilan kerja sehingga kaum miskin kurang efektif untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Karena faktor-faktor itulah maka tidak ada pilihan lain untuk kaum miskin tersebut untuk hidup menggelandang dan menjadi pengemis. Hal ini dilakukan semata-mata demi menyambung hidup mereka.

Pandangan hidup tersebut kemudian memunculkan strategi-strategi untuk kelangsungan hidup mereka, khususnya bagi kaum pengemis. Praktik mengemis sendiri bisa dibedakan menjadi dua. Yaitu dilakukan secara individu dan berkelompok. Masing-masing strategi memiliki kelebihan dan kelemahan. Salah satu keuntungan model individual adalah kebebasan menentukan daerah operasi dan menggunakan hasil yang diperoleh secara mandiri. Berbeda jika praktik

mengemis secara kelompok, mulai dari perencanaan, misalnya penentuan waktu dan daerah operasi, teknik yang akan digunakan, hingga ditingkat implementasi serta pembagian hasil harus dibicarakan bersama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 25 menyebutkan tanggung jawab Pemerintah dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah:

- 
- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulant kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya;
 - f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;
 - g. Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;
 - h. Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;
 - i. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial;

- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- k. Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraab kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. Mengalokasikan anggaran untuk menyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah telah bertekad untuk menanggulangi pengemis yang tersebar di seluruh tanah air. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Perlindungan sosial sendiri menjadi saran penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin. Dalam strategi ini perlu adanya rehabilitasi sosial guna mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan.

Rehabilitasi dilihat dari makna kata berasal dari bahasa inggris yaitu *rehabilitation*, artinya mengembalikan seperti semula. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), perbaikan anggota tubuh yang cacat dsb atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:940).

Jadi pengertian rehabilitasi dimaksud adalah mengembalikan kemampuan yang pernah dimilikinya, karena suatu hal musibah ia harus

kehilangan kemampuannya, kemampuan yang hilang inilah yang dikembalikan seperti semula yaitu seperti kondisi sebelum terjadi musibah yang dialami.

Sesuai dengan sifatnya yang rehabilitatif, maka serangkaian kegiatan pemulihan dan pemberian bantuan yakni untuk memperbaiki kemampuan orang untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, memperbaiki kemampuan orang dan lingkungan sosial dalam memecahkan masalah-masalah sosial, serta memperbaiki status dan peranan sosial orang sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dalam upaya rehabilitasi, perlu diadakan langkah-langkah dalam pelaksanaan rehabilitasi. Soetomo menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan rehabilitasi sebagai berikut:

- 1) Tahap Identifikasi

Masalah sosial merupakan fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat, perwujudannya dapat merupakan masalah lama yang mengalami perkembangan, akan tetapi dapat pula merupakan masalah baru yang muncul karena perkembangan dan perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan kultur, masalah sosial dianggap sebagai kondisi yang tidak diinginkan oleh karena dapat membawa kerugian baik secara fisik maupun nonfisik pada individu, kelompok maupun masyarakat. Secara keseluruhan, atau dapat juga merupakan kondisi yang dianggap bertentangan dengan nilai, norma atau standar sosial.

Tahap identifikasi dilakukan untuk membuka kesadaran dan keyakinan bahwa dalam kehidupan masyarakat terkandung gejala masalah sosial. Dalam studi masalah sosial, terdapat beberapa kriteria yang sering digunakan untuk melakukan identifikasi awal guna mengetahui apakah dalam suatu masyarakat terkandung fenomena yang disebut masalah sosial atau tidak. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu ukuran objektif dan subjektif (Raab and Selznick, 1964:5). Ukuran objektif merupakan instrumen untuk mengetahui keberadaan gejala masalah sosial dalam masyarakat dengan menggunakan parameter yang dianggap baku dengan memanfaatkan data-data. Ukuran subjektif merupakan instrumen identifikasi masalah sosial berdasarkan interpretasi masyarakat. Pada dasarnya interpretasi tersebut menggunakan referensi nilai, norma dan standar sosial yang berlaku. Ukuran ini bersifat relatif, karena setiap masyarakat dapat memiliki nilai, norma dan standar sosial yang berbeda.

2) Tahap Diagnosis

Setelah masalah sosial teridentifikasi, maka akan mendorong munculnya respon dari masyarakat, berupa tindakan bersama untuk memecahkan masalah, berupa tindakan bersama untuk memecahkan masalah. Tahap diagnosis dilakukan untuk upaya mencari dan mempelajari latar belakang masalah, faktor yang terkait dan terutama faktor yang menjadi penyebab atau sumber masalah. Hal ini sangat

membantu untuk menentukan tindakan sebagai upaya pemecahan masalah.

Dengan menggunakan cara berpikir yang sederhana, banyak orang beranggapan bahwa masalah sosial terjadi oleh karena ada hal yang salah atau kurang benar dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian mendiagnosis masalah sosial pada dasarnya adalah mencari sumber kesalahan.

Berkaitan dengan hal ini, Eitzen (1987:12) membedakan adanya dua pendekatan yaitu 1) *person blame approach* dengan melakukan diagnosis lebih menempatkan individu sebagai unit analisisnya. Maka dalam pemecahan masalah akan menawarkan tindakan penanganan penyandang masalah berupa berbagai bentuk rehabilitasi dan resosialisasi perilaku; 2) *system blame approach* yang lebih memfokuskan pada sistem sebagai unit analisis untuk mencari dan menjelaskan sumber masalahnya. Sistem ini melakukan pendekatan untuk memberikan rekomendasi pemecahan masalah berupa perubahan dan perbaikan kinerja sistemnya.

3) Tahap Treatment

Tahap treatment atau upaya pemecahan masalah adalah apabila dapat menghapus atau menghilangkan masalahnya dari realitas kehidupan sosial. Namun treatment tidak harus diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan masalah sosial, akan tetapi dapat mengurangi atau membatasi perkembangan masalah.

Treatment atau penanganan masalah sosial mempunyai cakupan yang luas, tidak terbatas pada tindakan rehabilitatif berupa upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang dianggap bermasalah. Usaha untuk melakukan pencegahan agar masalah sosial tidak terjadi atau paling tidak mengantisipasi dan meminimalisasi kemungkinan munculnya kondisi yang tidak diharapkan juga menjadi bagian dari penanganan masalah sosial.

Disamping itu, menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif dalam kehidupan baik individu maupun masyarakat juga merupakan faktor yang memberikan daya dukung bagi penanganan masalah sosial.

4. Pengemisan Menurut Perspektif Hukum Pidana

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat (Prodjodikoro, 1989: 14). Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Prodjodikoro, 1989: 1).

Perbuatan mengemis di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang dikategorikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Tindak

pidana pengemis diatur dalam pasal 504 KUHP. Adapun aturan pidana tentang perbuatan mengemis terdapat dalam pasal 504 menyatakan bahwa:

1. Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemis, dengan kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan dengan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum.

Tertib hukum menjadi terganggu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran hukum. Perkembangan hukum itu sendiri makin lama akan ketinggalan, karena kemampuannya dalam merumuskan hukum maupun pelaksanaannya akibat kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk dan kompleks. Pada gilirannya akan terjadi pertentangan kebutuhan hidup dalam masyarakat dan akhirnya muncul perlawanan terhadap hukum yang akan menimbulkan masalah sosial.

Permasalahan pengemis sebagai suatu pelanggaran dalam hukum pidana, akan tetapi didalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hal berbeda bahwa:

1. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

5. Kerangka Berpikir

Dalam kehidupan sosial, manusia akan dihadapi dengan masalah-masalah sosial. Masalah sosial sangat luas cakupannya, bukan hanya mencakup permasalahan-permasalahan kemasyarakatan tetapi juga mencakup didalam masyarakat yang berhubungan dengan gejala-gejala kehidupan masyarakat.

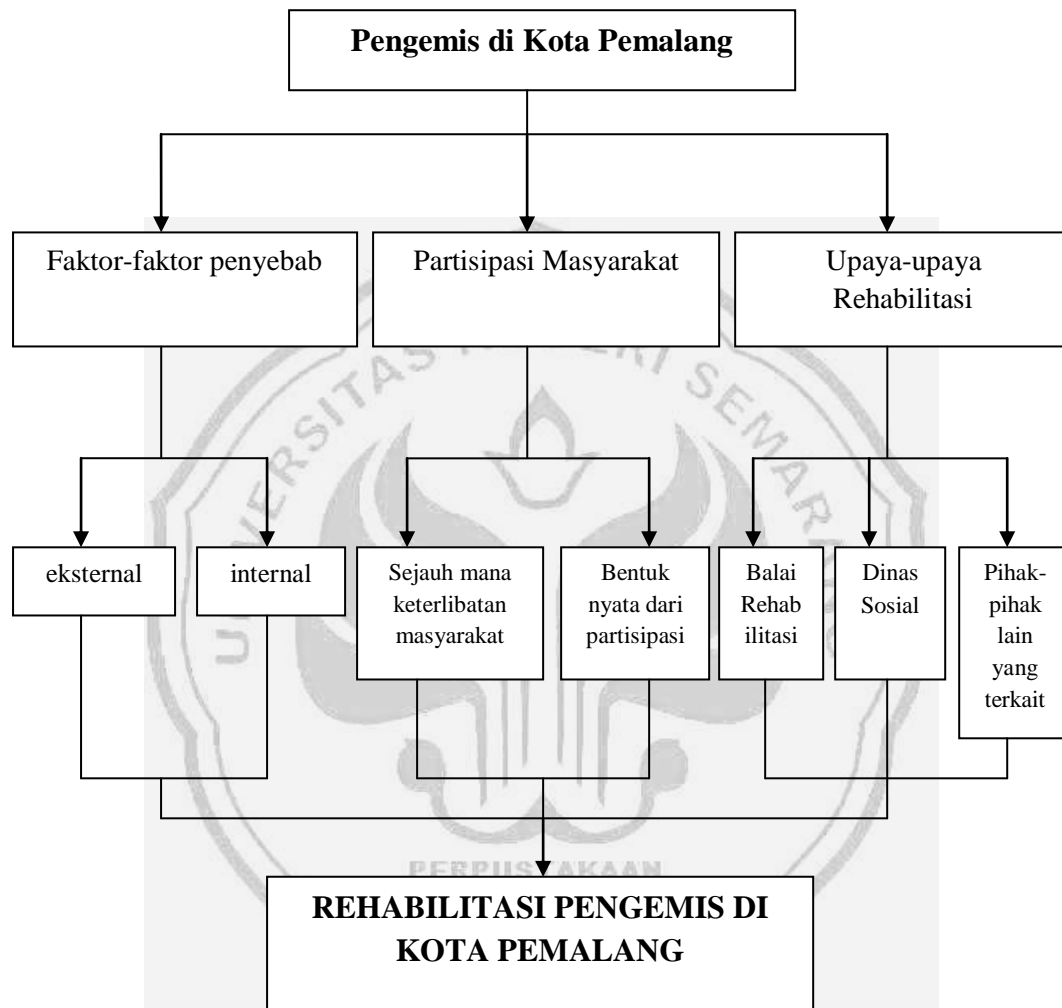
Sumber-sumber masalah sosial dapat timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, biologi dan kebudayaan. Masalah-masalah sosial dapat berupa masalah kemiskinan, kejahatan, masalah generasi muda, kependudukan, dan masalah lingkungan hidup.

Masalah tersebut dapat bertalian dengan masalah alami ataupun masalah pribadi, maka ada beberapa penyebab timbulnya masalah sosial, antara lain faktor alam, faktor biologis, faktor budayawi, dan faktor sosial. Faktor alam berkaitan dengan menepisnya sumber daya alam. Faktor biologis berkaitan dengan bertambahnya populasi manusia. Faktor budayawi berkaitan dengan keguncangan mental dan bertalian dengan ragam penyakit kejiwaan. Faktor sosial berkaitan dengan berbagai kebijaksanaan ekonomi dan politik yang dikendalikan bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, disebutkan bahwa pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya pengemis, serta bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Pemerintah telah bertekad untuk menanggulangi pengemis yang tersebar di seluruh tanah air. Perlindungan sosial menjadi saran penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin. Dalam strategi ini perlu adanya rehabilitasi sosial guna mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Rehabilitasi ini berupa kegiatan pemulihan dan pemberian bantuan yakni untuk memperbaiki kemampuan orang untuk melaksanakan fungsi sosial dan lingkungan sosialnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial, serta memperbaiki status dan peranan sosial sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dari uraian diatas mengenai kerangka berpikir dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Bagan I : kerangka berpikir penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tentang bagaimana Rehabilitasi Pengemis di Kota Pemalang. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif atau lebih kita kenal sebagai penjelasan dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dipusatkan pada konsepsi tentang metode fenomenologi. Pendekatan fenomenologi memandang tingkah laku manusia, tentang apa yang informan katakan dan yang diperbuat sebagai hasil dari bagaimana menafsirkannya. Pendekatan ini menuntut bersatunya subjek peneliti dan subjek pendukung objek lapangan, menghayati kasus, dan melibatkan penulis dalam kasus lapangannya. Fenomenologi mencakup kasus dengan berbagai fenomena sosial dalam masyarakat.

Alasan penulis menggunakan pendekatan fenomenologi karena dalam penelitian ini penulis mengkaji pada pemahaman masalah atau gejala melalui perspektif para subjek penelitian. Perspektif orang-orang yang secara langsung terlibat dalam masalah tersebut.

B. Lokasi penelitian

Dengan melihat judul skripsi ini maka dapat diketahui dimana lokasi akan diteliti. Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pemalang. Alasan penulis memilih Kota Pemalang adalah karena pengemis di wilayah Kota Pemalang masih sangat tinggi, serta penulis juga memilih Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I untuk dijadikan tempat penelitian. Instansi pemerintah tersebut merupakan instansi yang menangani dan memberikan binaan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan masyarakat lingkungan PMKS/PGOT daerah rawan masalah PGOT.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah rehabilitasi pengemis di Kota Pemalang, meliputi: 1) faktor yang menyebabkan munculnya pengemisan di Kota Pemalang. Faktor tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal berasal dari diri pengemis itu sendiri, sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari lingkungan sekitar; 2) partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan pengemisan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I. Sejauh mana keterlibatan dan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pengemisan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I; 3) upaya-upaya yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I untuk merehabilitasi pengemis di Kota Pemalang yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I, instansi

Pemerintah yakni Dinas Sosial Kabupaten Pemalang serta pihak-pihak lain yang terkait untuk merehabilitasi pengemis di Kota Pemalang.

D. Sumber data penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan. Peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk menggali informasi mengenai rehabilitasi pengemis di Kota Pemalang.

Yang menjadi sumber data utama dari penelitian ini adalah pengemis dan para pekerja sosial di dalam Balai Rehabilitasi. Sedangkan sumber data pendukung adalah pihak-pihak yang ikut terlibat dalam rehabilitasi pengemis atau pejabat / staf dari Dinas Sosial Kabupaten Pemalang dan pihak-pihak lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atau arsip didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini.

Data tambahan dalam penelitian ini adalah buku, dokumen, arsip dan foto yang berhubungan dengan rehabilitasi pengemis di Kabupaten Pemalang.

E. Metode pengumpulan data

1. Metode wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan pula. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah informan yang merupakan subjek penelitian dan informan yang bukan merupakan objek penelitian, antara lain:

- a. Pengemis. Dari mereka dapat diperoleh informasi tentang keseharian hidup sebagai pengemis dan tanggapan mereka tentang penanganan rehabilitasi pengemis.
- b. Pekerja-pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pematang I. Dari mereka dapat diperoleh informasi tentang

latar belakang, kerjasama dengan pihak lain, tantangan dan hambatan, pelaksanaan rehabilitasi pengemis yang dilakukan.

- c. Instansi Pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait. Instansi pemerintah dimaksud yakni petugas Dinas Sosial Kabupaten Pemalang. Hasil wawancara antara lain mengenai peranan instansi pemerintah atau pihak-pihak lain yang terkait berkenaan penanggulangan pengemisan, latar belakang Dinas Sosial melakukan rehabilitasi dan penanganan terhadap pengemis.

Penulis melakukan wawancara pada saat penulis memulai penelitian yaitu pada bulan April-Mei 2013. Wawancara dengan petugas Balai Rehabilitasi Sosial dan Penerima Manfaat dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” dengan mewawancarai satu persatu, wawancara sendiri dilakukan ketika ada waktu senggang dengan petugas dan penerima manfaat biasanya setelah menerima materi bimbingan atau ketika waktu istirahat. Wawancara dengan pengemis yang berada di jalanan dan di pasar-pasar dilakukan ketika pagi hari hingga siang hari. Begitu juga wawancara dengan pekerja dari Dinas-Dinas lain yang terkait.

Kendala yang dihadapi penulis ketika melakukan wawancara hanya waktu yang terkadang kurang mendukung. Sering kali informan sulit untuk ditemui. Adapun daftar nama-nama informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan Subjek Penelitian

No.	Nama	L/P	Umur	Jabatan/pekerjaan
1.	Ign. Agus Aprijanto	L	51	Kepala
2.	Rustinawati	P	50	Kepala Seksi Pelayanan & Resos
3.	Ngadino	L	49	Pengadministrasi Penyantunan Teknis
4.	Wardi'in	L	50	Pengadministrasi Pelayanan & Resos Teknis
5.	Yulianto	L	30	Penerima Manfaat
6.	Istiati	P	26	Penerima Manfaat
7.	Yaemah	P	40	Penerima Manfaat
8.	Teguh Supriyadi	L	39	Penerima Manfaat
9.	Effendi Wiharta	L	46	Penerima Manfaat
10.	Abdul Rohman/ Pak Kumis	L	50	Penerima Manfaat
11.	Riyana Safitri	P	19	Penerima Manfaat
12.	Ningrum	P	41	Penerima Manfaat
13.	Supadi	L	45	Staf Dinsosnakertrans Kabupaten Pemalang
14.	Sumar	L	43	Staf Satpol PP Kabupaten Pemalang
15.	Kadir Rusman	L	46	Staf Satpol PP Kabupaten Pemalang
16.	Slamet	L	58	Pengemis
17.	Wahyuni	P	49	Pengemis
18.	Basuki	L	53	Pengemis

19.	Sayidi	L	75	Pengemis
20.	Mupiyah	P	36	Pengemis
21.	Abdul Afif	L	52	Masyarakat
22.	Niswati	P	40	Masyarakat

2. Observasi langsung

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat atau berlangsungnya peristiwa, sehingga peneliti berada bersama objek yang akan diteliti.

Pelaksanaan observasi dalam penelitian sendiri dilaksanakan pada tanggal 10-11, 13, 15, 18, 22, dan 23 April 2013. Observasi pertama yang penulis lakukan pada tanggal 10-11 April 2013 yaitu untuk melihat kondisi fisik tempat penelitian secara umum yaitu Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” serta melihat sarana dan prasarana yang ada. Penulis juga mengamati kondisi *cottage* yang disediakan untuk tempat tinggal penerima manfaat (PGOT), kegiatan petugas Balai terhadap kegiatan rehabilitasi, kegiatan penerima manfaat (PGOT) dalam hal ini kegiatan yang diberikan seperti pembelajaran keterampilan (*life skill*) seperti menjahit, membuat tas belanja dari plastik, membuat keset lantai, membuat sapu gelagah,

juga bercocok tanam. Tidak hanya itu, pembelajaran Bela Negara / Kewarganegaraan dan pembelajaran Agama juga di berikan.

Observasi kedua yang dilakukan penulis pada tanggal 13 April 2013 yaitu mengamati aktivitas pengemis yang berada di pasar-pasar dan di jalan-jalan. Dalam hal ini penulis mengamati pengemis di sekitar pasar Comal, pasar Susukan, pasar Petarukan dan di Desa Gintung. Penulis juga mendatangi salah satu rumah pengemis yang berada di Desa Kauman. Penulis berinteraksi dengan pengemis-pengemis tersebut dengan maksud untuk mencari informasi-informasi yang mendukung penelitian ini.

Observasi ketiga penulis lakukan pada tanggal 15 April 2013. dalam hal ini penulis mencari informasi mengenai peran dari Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” dalam merehabilitasi pengemis. Observasi keempat dilakukan pada tanggal 18 dan 22-23 April 2013 dengan mencari informasi ke Instansi-instansi yang bekerjasama dalam hal rehabilitasi pengemis di Pemalang. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara ke Dinas Sosial Kabupaten Pemalang dan kantor Satpol PP Kabupaten Pemalang.

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang dikaji. Peneliti datang langsung ke lokasi penelitian yaitu tempat pengemis-pengemis beraktivitas di wilayah Kota Pemalang, ke Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I, Dinas Sosial

Kabupaten Pemalang, serta beberapa tempat lain yang terkait. Tujuan dari observasi ini adalah untuk :

- a. Mengetahui kondisi tempat pengemis biasa beraktivitas.
- b. Mengetahui kondisi pengemis yang meliputi perilaku dan tindakan mereka dalam berinteraksi.
- c. Mengetahui kondisi Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”

Pemalang I dan Dinas-Dinas lain yang terkait, meliputi kegiatan dan pelayanan pembinaan yang dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui bukti tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan guna memperoleh informasi tentang rehabilitasi pengemis di Kota Pemalang. Dalam penelitian ini, peneliti mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data berupa foto. Foto menghasilkan data

deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering di analisis secara induktif. Pengambilan dokumentasi sendiri dilakukan pada tanggal 10 April-23April 2013.

F. Uji validitas

Penelitian ini dalam menentukan validitas data menggunakan teknik pengujian triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data untuk menguji keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2006: 330).

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong 2006: 330). Hal itu dicapai dengan jalan: 1). Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Balai, Petugas Balai, dan Penerima Manfaat. Hasil wawancara dengan Ngadino (50 tahun) pada tanggal 15 April 2013 tentang permasalahan yang terjadi di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” dalam memberikan pelayanan rehabilitasi kepada Penerima Manfaat, diperoleh data bahwa pelayanan rehabilitasi dari petugas kepada Penerima Manfaat lebih optimal karena didukung dengan banyaknya pegawai sehingga pelayanan terhadap Penerima Manfaat dapat maksimal dan lebih baik.

Namun dari hasil observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa masih ada permasalahan yaitu kurangnya tenaga ahli, tenaga pengajar, dan sarana prasarana yang belum memadai. Hal ini penulis lakukan uji keabsahan dengan melakukan wawancara dengan Agus (51 tahun) pada tanggal 23 April 2013. Data yang diperoleh adalah bahwa memang masih ada permasalahan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti". Masih kurangnya tenaga ahli dan tenaga pengajar untuk memberikan bimbingan rehabilitasi terhadap Penerima Manfaat. Untuk tenaga ahli / tenaga profesional sendiri masih ada 1 orang padahal jumlah Penerima Manfaat sendiri banyak sekali serta sarana prasarana yang masih belum mendukung. Hal ini yang kemudian membuat Penerima Manfaat kurang mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang optimal; 2). Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian. Hasil dari wawancara dengan Agus (51 tahun) pada tanggal 23 April 2013 menyatakan bahwa partisipasi dari masyarakat sekitar terhadap Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" tidak ada sama sekali. Akan tetapi hasil wawancara penulis dengan Teguh (39) dan Wardi'in (50 tahun) mendapatkan keterangan bahwa partisipasi masyarakat sekitar terhadap Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" sebenarnya ada walaupun hanya sebagian kecil saja; 3). Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dengan hasil wawancara terhadap Kepala, Petugas maupun Penerima Manfaat sejauh ini sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan; 4). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Penulis melakukan pengecekan ulang

data wawancara dengan Kepala Balai Rehabilitasi Sosial dengan Petugas Balai Rehabilitasi Sosial dengan mengulang lagi pertanyaan yang sama dengan membandingkan jawaban mereka untuk mempertegas dan memperbaiki apabila ada kekeliruan dan menambahkan jawaban yang kurang. Begitu pula dengan pertanyaan untuk Penerima Manfaat.

G. Analisis data

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada, digunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data-data yang sudah diperoleh melalui proses analisis yang mendalam dan selanjutnya dikomunikasikan secara runtut atau dalam bentuk naratif.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Menurut Miles Huberman (1999: 20) tahap analisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

b. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu dibutuhkan.

Adapun data yang direduksi adalah seluruh data mengenai permasalahan penelitian yang kemudian digolongkan kedalam tiga bagian yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengemisan di Kota Pemalang, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pengemisan di Kota Pemalang, upaya-upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi pengemis di Kota Pemalang.

c. Penyajian data

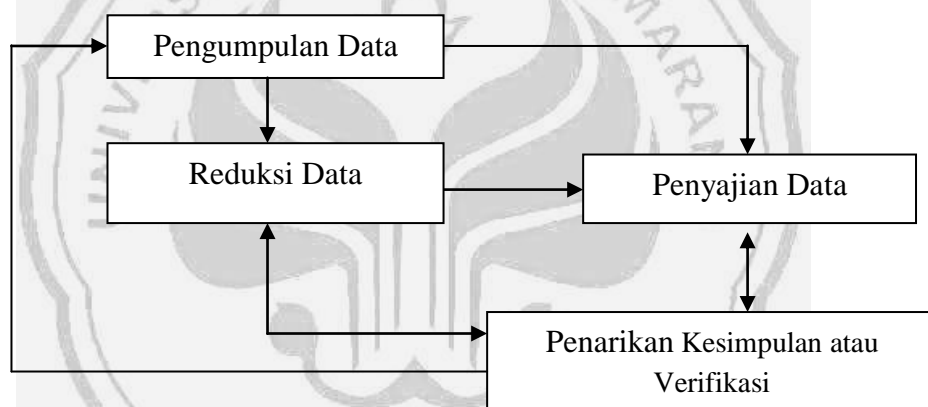
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan yaitu data yang sesuai dengan apa yang diteliti, hanya dibatasi pada permasalahan yang ada yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengemisan di Kota Pemalang, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pengemisan di Kota Pemalang, upaya-upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi pengemis di Kota Pemalang.

d. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan pada semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dan dapat menjawab dari semua permasalahan yang ada. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang saling berhubungan pada saat pengambilan data maupun sesudah pengumpulan data.

Keempatnya dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 2. Skema Alur Kegiatan Analisis Data



Komponen analisis data model interaktif (Milles 1992: 19)

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan dirasa sudah cukup maka diadakan reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

Jika terjadi kekurangan data dalam penarikan kesimpulan maka dapat digali dari catatan lapangan. Jika hal itu tidak dapat diketemukan, maka penulis akan mengumpulkan data kembali. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus sampai penulis merasa cukup memperoleh data yang diperlukan dan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Balai Rehabilitasi Sosial

Samekto Karti Pematang I

a. Sejarah Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pematang I

Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pematang I berada dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksanaan operasional Dinas yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial khususnya penanganan masalah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk wilayah operasional di Jawa Tengah. Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pematang I terletak di Jl. Raya Pabrik Comal Baru Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.



**Gambar 1: Lokasi Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I
Sumber: Dokumentasi Foto Rizki Amalia**

Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I berdiri sejak tahun 1953 yang semula merupakan Panti Karya “Samekto Karti” Comal Kabupaten Pemalang dengan nama Panti Karya Berkeluarga “Mardi Husodo” yang semua gerak dan operasionalnya masih berada di bawah Kantor Sosial Kabupaten Pemalang. Dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Januari 1972 Nomor : PEG.VIII.021-5/72, Panti Karya “Samekto Karti” Comal Pemalang sebagai pilot proyek pendidikan dan rehabilitasi pengemis, gelandangan dan orang-orang terlantar (PGOT) beralih naungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang. Hal itu disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Nopember 1991 Nomor : 161 / 182 / 91 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Sosial Jawa Tengah,

bahwa Panti Karya “Samekto Karti” Comal Pemalang disahkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial Tingkat I Jawa Tengah sampai sekarang. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Panti Karya menjadi Balai Rehabilitasi Sosial, yang mempunyai Unit Rehabilitasi Sosial.

b. Visi dan Misi Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I

Untuk menjalankan target fungsional dalam menjalankan perannya, Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I memiliki visi yaitu “Terwujudnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Tengah yang semakin mandiri dan sejahtera”.

Misi dari Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I adalah: 1). Menumbuhkembangkan prakarsa dan peran aktif, potensi, sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), eks psikotik dan lansia terlantar; 2). Meningkatkan jangkauan, kualitas, efektivitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap

penyanggah masalah kesejahteraan sosial pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), eks psikotik dan lansia terlantar; 3). Mengembangkan, memperkuat sistem yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyanggah masalah kesejahteraan social pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), eks psikotik dan lansia terlantar; 4). profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi dan jaminan sosial bagi pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), eks psikotik dan lansia terlantar; 5) Meningkatkan jangkauan, kualitas, efektivitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap penyanggah masalah kesejahteraan sosial pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), eks psikotik dan lansia terlantar; 6). Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyanggah masalah kesejahteraan sosial pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), eks psikotik dan lansia terlantar; 7). Memperkuat kelembagaan kesejahteraan sosial dalam mendukung penanganan penyanggah masalah kesejahteraan sosial pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), eks psikotik dan lansia terlantar.

Tugas pokok dari Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional

dan atau kegiatan penunjang Dinas Sosial di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan menggunakan pendekatan multi layanan.

**c. Profil Petugas Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”
Pemalang I**

Petugas di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I berjumlah 21 petugas. Petugas tersebut terjun langsung dalam memfasilitasi ataupun merehabilitasi dan menangani penerima manfaat. Setiap petugas memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Petugas dalam Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I sudah terlatih dan cukup professional dalam menangani penerima manfaat. Adapun daftar nama dan jabatan petugas Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Petugas di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I

No.	Nama	Jabatan
1.	Ign. AGUS APRIJANTO, S.Sos, MM.	KEPALA
2.	Dra. UMI FATMIYATI	KEPALASUB BAGIAN TATA USAHA
3.	TUTI	PENGADMINISTRASI UMUM
4.	ROKHAYATNI	BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN
5.	WINARSIH	PENGAD. PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA

6.	SINGGANGWATI	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	
7.	SHOLIHIN	PENGEMUDI	
8.	MUH. SAECHU	PENJAGA KANTOR	
9.	TOLKAH MANSUR	PRAMU KANTOR	
10.	PEBRI DWI SUSANTO, A. Md.	OPERATOR KOMPUTER	
11.	DIAH RAKANTININGSIH, BA	KEPALA SEKSI PENYANTUNAN	
12.	ROKHATI	PRAMU ASRAMA	
13.	NGADINO, SH	PENGADMINISTRASI PENYANTUNAN	TEKNIS
14.	INA FIL MARYAM	JURU MASAK	
15.	WIWIN WAHNINGSIH	OPERATOR KOMPUTER	
16.	RUSTINAWATI, SH	KEPALA SEKSI PELAYANAN & RESOS	
17.	SUWARNO	PEMBIMBING KETRAMPILAN	LATIHAN
18.	WARDI'IN	PENGADMINISTRASI PELAYANAN & RESOS	TEKNIS
19.	SUBALI	PEKERJA SOSIAL LANJUTAN	PELAKSANA
20.	MUCHAMAD IDAM SUMARNO, AMK	TENAGA MEDIS	
21.	CATUR SETYO EDI PURWANTO	PRAMU ASRAMA	

Sumber: Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”

Hasil wawancara dengan Bapak Agus (Kepala Balai) tentang tugas dan tanggungjawab tiap-tiap staf Balai Resos “Samekto Karti”

Pemalang I:

“Untuk jumlah pegawai jumlah keseluruhan ada 40 orang. Namun yang di Balai Resos “Samekto Karti” sini

ada 21 orang. Selebihnya ada di Unit Bisma Upakara sana mbak. Pembagiannya sudah jelas ya mbak. Pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang itu sudah sesuai seperti yang ada di uraian kerja yang terdapat di tiap-tiap Kasi mbak. Untuk pelatih/instruktur keterampilan sendiri kita memanggil dari luar mbak, tapi nanti kita membayar, bukannya mereka terus menyumbangkan tenaga itu nggak. Nanti dari petugas ada yang mendampingi dan bertanggungjawab atas pelatihan keterampilan tersebut” (Wawancara dengan Bapak Agus tanggal 22 April 2013, pukul 10. 20 di kantor Balai Resos Samekto Karti).

d. Profil Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I

Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) serta *psikotik* dan *exs-psikotik* di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” disebut dengan Penerima Manfaat (PM). Jumlah penerima manfaat sampai bulan Maret berjumlah 97 orang yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Tidak hanya dari wilayah Kabupaten Pemalang saja melainkan ada beberapa penerima manfaat yang berasal dari luar Jawa Tengah. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki dewasa 54 orang, perempuan dewasa 41 orang dan anak laki-laki 1 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah PGOT dan *exs-psikotik* yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I. Jumlah penerima manfaat (PGOT) berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Penerima manfaat (PGOT) Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Putra	Putri	Jumlah
1.	SD	4	6	10
2.	SMP	1	2	4
3.	SMA/SMK	-	1	1
4.	Lain-lain	4	2	6
	Total	10	11	2

Sumber: Dokumen Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti, 2013

Tabel di atas menunjukkan jumlah penerima manfaat berdasarkan jenjang pendidikan yang pernah mereka tempuh. Penerima manfaat dengan jenjang Sekolah Dasar menjadi paling banyak yakni 10 orang, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 4 orang, jenjang Sekolah Menengah Atas / Kejuruan berjumlah 1 orang, serta lain-lain (dalam hal ini tidak berpendidikan) berjumlah 6 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang melakukan pengemisan tidak hanya orang tidak berpendidikan dan berpendidikan rendah saja. dalam hal ini orang dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jenjang Sekolah Menengah Atas / Kejuruan pun cenderung melakukan pengemisan.

Selain itu jumlah pengemis yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I juga dapat dilihat menurut usia

dan jenis kelamin. Daftar penerima manfaat berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Penerima Manfaat (PGOT) Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

No.	Usia	L	P	Jumlah
1.	15-20	1	-	1
2.	21-25	1	1	3
3.	26-30	1	2	3
4.	31-35	1	1	2
5.	36-40	1	1	2
6.	41-45	-	3	3
7.	46-50	3	1	4
8.	51-55	-	2	2
9.	56-60	1	-	1
Jumlah		10	11	21

Sumber: Dokumen Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti, 2013

Tabel di atas menunjukkan jumlah pengemis berdasarkan usia dan jenis kelamin. Rata-rata usia pengemis yang melakukan tindakan pengemisan adalah pengemis dengan usia 30-55 tahun keatas dan lebih didominasi oleh pengemis perempuan. Untuk usia dibawah 30 tahun sendiri sedikit jumlahnya. Dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang hampir setara.

**e. Sarana dan Prasarana dalam Balai Rehabilitasi Sosial
“Samekto Karti” Pemalang I**

Dengan adanya sarana dan prasarana ini, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I antara lain: a). tanah seluas 34.050 m²; b). bangunan: asrama / *cottage* 18 unit, kantor 1 unit, aula 1 unit, rumah dinas karyawan 5 unit, dapur umum 1 unit, gedung keterampilan 1 unit (7 bagian), musholla 1 unit, pos jaga 1 unit, ruang klasikal 1 unit, ruang poliklinik 1 unit, ruang konseling 1 unit, ruang rapat 1 unit; c) kendaraan: roda 3 1 unit, roda 4 1 unit; d). peralatan kantor, seperti: komputer, printer, mesin ketik, dan *sound system*.



**Gambar 2: cottage tempat tinggal penerima manfaat
Sumber: Dokumen Foto Rizki Amalia**

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengemis di Kota Pemalang

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa maraknya pengemis di Kota Pemalang paling tidak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri sang peminta-minta yang meliputi sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, kesehatan, cacat fisik maupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi luar dari sang peminta-minta yang meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan agama.

Faktor –faktor terjadinya pengemis berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ngadino (50 tahun), ada beberapa faktor mereka hidup dijalanan kemudian mereka melakukan pengemis atau meminta-minta. Mungkin karena *broken home*, tidak dianggap oleh keluarga, nakal, minimnya pendidikan, lingkungan pergaulannya yang tidak mendukung, mungkin karena perkembangan modernisasi, juga bisa saja karena bencana alam.

Faktor-faktor lainnya juga diungkapkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang. Seperti dalam wawancara dengan bapak Kadir dan bapak Sumar. Berikut hasil wawancaranya:

“sebenarnya untuk kegiatan penjarangan sendiri memang rutin tiap 2 bulan sekali ya mbak, tapi kita nggak bisa menjamin itu pengemis sudah benar-benar diberantas. Tiap kali ada penjarangan sering ada yang lepas, melarikan diri, ngumpet, macem-macem mbak. Kadang juga ada yang sudah pernah kena terus kena penjarangan lagi. Kalau

ditanya kenapa kembali lagi ya jawabnya karena terdesak kebutuhan. Terus juga ini, kadang saya juga tanya ke pengemis-pengemis yang masih anak-anak, katanya mereka ikut-ikutan temannya ngemis, juga karena sengaja di eksploitasi orangtuanya untuk ikut mengemis, kalau saya ketemu pengemis yang sudah sepuh mbah-mbah dipasar kadang malah saya biarkan mbak, karena masih merasa kasihan kalau dibawa, padahal seharusnya tetap harus dijaring. Juga karena ini mbak, adanya buangan pengemis-pengemis dan gelandangan dari daerah luar Pematang Jaya itu sering sekali menemukan kasus seperti itu, mereka akhirnya kan berkeliaran di Pematang Jaya”.

Faktor-faktor lain penyebab terjadinya pengemis-an juga disampaikan oleh ibu Niswati. Berikut hasil wawancaranya:

“niku mbak, pak Dul niku riyen teng Lampung nderek istrine, bar niku ngertos bapake kena *stroke* dijak wangsul mriki kalih ibune. Pas ibune meninggal pak Dul dados mboten gadah nopo-nopo malih teng kriki wong niku jebule lare temon. Dadose kan griyone disuwun keluarga asline. Lha pak Dul akhire diajak ken ninggali griyo kosong niku, mboten saged kerja mbak wong sampun sepuh, mboten saged jalan, akhire dikengken tiyang-tiyang kriki pasang kaleng teng ngajengan setiap hari. Wonten tiyang lewat nggeh nyuwun-nyuwun, kalih astone ngawe-awe”.

“ itu mbak, pak Dul dulu dari Lampung ikut istrinya, setelah pak Dul kena *stroke* kemudian diajak pulang oleh ibunya kesini. Setelah ibunya meninggal pak Dul jadi nggak punya apa-apa lagi disini ternyata pak Dul anak angkat dari ibu tersebut. Dari itu rumahnya yang ditempati diambil oleh keluarga ibunya. Akhirnya pak Dul diajak untuk menempati rumah kosong itu, nggak bisa kerja mbak karena udah tua, nggak bisa jalan, akhirnya disarankan warga-warga sini untuk pasang kaleng disitu setiap hari. Kalau ada orang lewat minta-minta sambil melambaikan tangan memanggil orang yang lewat tersebut”

Hasil wawancara diatas dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pematang Jaya dan ibu Niswati diatas

menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya pengemis di Pematang antara lain disebabkan karena kurang efektifnya kegiatan penjarangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pematang. Pengemis belum sepenuhnya terkena razia dikarenakan pengemis tersebut lepas, melarikan diri, bahkan bersembunyi ketika terjadi penjarangan. Faktor perasaan iba juga terkadang masih berlaku bagi petugas Satpol PP dalam melakukan penjarangan dengan membiarkan dan melepaskan pengemis yang sudah tua. Sehingga menyebabkan mereka dapat beroperasi lagi dilain waktu. Faktor lain karena pengaruh lingkungan pertemanan dengan ikut-ikutan teman melakukan tindakan pengemis yang biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil. Hal ini juga dipengaruhi oleh orangtua yang mengeksploitasi anak-anaknya untuk ikut serta mengemis. Penyebab lain karena adanya buangan pengemis-pengemis dan gelandangan dari luar daerah yang dibuang dan masuk ke Pematang yang menyebabkan mereka kemudian beroperasi di daerah-daerah yang ada di Pematang.

Faktor lain yang dikemukakan oleh ibu Niswati menyebutkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan pengemis adalah karena terlantar dari keluarganya serta kondisi fisik yang sudah tua dan kondisi badan yang tidak sehat sehingga menyebabkan orang tersebut memintaminta agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dapat bertahan hidup.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa maraknya pengemis di kota Pematang Siantar disebabkan oleh faktor utama yaitu: faktor lingkungan, ekonomi, lanjut usia, cacat tubuh, pendidikan rendah serta kurangnya keterampilan kerja dan minimnya lapangan pekerjaan yang diperlukan oleh tenaga kerja tidak terampil dan tidak berpendidikan.

a. Faktor Internal

Faktor lanjut usia menjadi penyebab seorang menjadi pengemis. Kondisi ini menjadikan kemampuan bekerja semakin menurun, yang akan berdampak pada kemampuan bekerjanya. Usia tua sering menjadi penyebab seseorang menjadi pengemis karena sudah tidak memiliki penghasilan dari bekerja, dan harus memintaminta untuk menyambung hidup.

Seperti yang dialami oleh Ningrum (63 tahun). Awalnya Ningrum pernah bekerja di Bandung menjadi pembantu rumah tangga. Namun karena usia yang semakin renta majikannya memecat dan dikembalikan ke kota asal Ningrum yaitu di Petarukan. Karena tidak memiliki keluarga lagi di Petarukan, Ningrum memutuskan untuk mencari pekerjaan di jalanan. Biasanya dia mangkal di pasar Petarukan, tidak jarang juga memintaminta dengan cara *door to door* ke rumah-rumah warga. Ningrum bercerita:

“saya dulu kerja di Bandung jadi pembantu, karena saya sudah semakin tua majikan saya memecat. Saya diajak pulang sama majikan saya, ternyata malah saya diturunin dijalan, saya kayak dibuang dijalan gitu mbak. Saya

bingung karena udah nggak punya keluarga lagi, saya nggak punya anak. Karena bingung saya akhirnya pertama-tama tidur dimasjid, kadang juga diemper toko sama tidur di pasar. Karena saya nggak punya keterampilan kerja, saya udah tua juga, saya akhirnya minta-minta di pasar Petarukan sama dijalan-jalan. Kadang juga saya datang ke rumah-rumah orang untuk minta-minta. Pas lagi minta-minta ketemu sama pegawai dari kecamatan terus saya dibilangin dan dibawa kesini...” (hasil wawancara peneliti dengan Ningrum di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti, 15 April 2013).

Ningrum (52 tahun), Slamet (58 tahun), Sayidi (75 tahun), pak Dul (65 tahun) dan Wahyuni (49 tahun) adalah pengemis yang disebabkan oleh kondisi usia yang sudah tua renta. Mereka tidak memiliki keluarga, ataupun anak sehingga menjadikan mereka hidup dijalan untuk dapat menyambung hidup. Tanpa adanya keterampilan kerja, minimnya tingkat pendidikan mereka dan tenaga yang semakin lemah, menjadikan mereka hidup dengan cara meminta-minta dijalan, dipasar dan di kompleks pertokoan.

Tidak hanya itu, cacat tubuh juga menjadi faktor mengapa seseorang melakukan pengemis. Yaitu Slamet (58 tahun), Sayidi (75 tahun) dan pak Dul (63 tahun) adalah pengemis yang disebabkan karena usia tua dan cacat tubuh. Cacat kaki yang dialami Sayidi (75 tahun) menjadikannya tidak dapat bekerja dengan baik, tidak ada orang yang mau mempekerjakannya sebagai pegawai ataupun buruh dengan keadaan cacat kaki seperti Sayidi. Sayidi juga tidak memiliki keterampilan khusus. Sehari-harinya Sayidi mangkal di kompleks pertokoan Alfamart di Ulujami dengan berbekal kedua tongkatnya.

Dengan kondisi seperti ini, Sayidi mampu mengetuk hati orang-orang untuk memberikan uang kepadanya karena belas kasihan. Meminta-minta ini ia jalani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mengemis karena kondisi cacat tubuh ternyata tidak hanya dialami oleh Sayidi, Slamet dan pak Dul saja. Kenyataan di lapangan, pengemis dengan cacat tubuh, terkadang memang ada yang benar-benar cacat namun ada juga cacat tubuh mereka yang hanya trik saja. Hal ini hanya untuk mengelabui dan menjadi strategi mereka untuk menarik simpati dan belas kasihan orang-orang.

b. Faktor Eksternal

Faktor ekonomi dan kemiskinan menjadikan Mupiyah (36 tahun) menjadi pengemis. Hasil jerih payah menarik becak suaminya dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dengan 7 orang anaknya. Karena kondisi inilah, mengemis akhirnya menjadi pilihan Mupiyah. Kerja ini dilakukan semata-mata untuk membantu suaminya mencari nafkah dan menutup kebutuhan sehari-hari. Suami Mupiyah memiliki penghasilan sehari tidak lebih dari Rp. 25.000 jika digabungkan menjadi satu penghasilan yang mereka dapat tidak kurang Rp. 35.000. Dengan uang sebesar itu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, jajan anak-anak, termasuk membayar listrik sebesar Rp. 50.000 perbulan

kepada tetangga sebelahnya. Mupiyah biasa beroperasi di pasar Comal mulai pukul 09.00 sampai pukul 16.00 dengan membawa serta kedua anaknya terkecil. Seringkali anak-anaknya juga dimanfaatkan untuk meminta-minta keliling pasar Comal.

Hasil wawancara peneliti dengan Mupiyah yang dilakukan dirumahnya:

“...biasane kulo mangkat peken nggeh jam 9 mbak. Pokoke angger benah-benah wes rampung, ngadusi bocah-bocah wes rampung yo mangkat peken. Menowo neng pasar yo bocah-bocah tak culke dolanan dhewe sekalian nyambi (ngemis). Aku juga kadang nyambi golek-golek bawang mbak. Kadang ono sing pesen bawang. Lumayan saged kangge nambah-nambah penghasilan. Nek ora kerjo ngene (ngemis) yo ora cukup mbak, bojoku kan kadang intuk kadang ora wong cuma mbecak...” (Mupiyah, 13 April 2013).

“...biasanya saya berangkat ke pasar ya jam 9 mbak. Pokoknya kalau beres-beres sudah selesai, mamndikan anak-anak sudah selesai ya berangkat ke pasar. Kalau di pasar ya anak-anak bermain sendiri, mereka sambil minta-minta (ngemis) juga. Aku juga kadang-kadang cari-cari bawang mbak. Kadang ada yang pesen bawang dari saya. Yah lumayan bisa buat tambahan penghasilan saya. Kalo nggak kerja begini (minta-minta) ya enggak cukup mbak, suami saya kerjanya kadang dapat kadang enggak kan cuma mbecak...” (Mupiyah, 13 April 2013).

Faktor lingkungan keluarga, dalam hal ini karena *broken home* dan tidak dianggap keluarga juga dialami oleh Abdul Rohman (50 tahun) atau kerap disapa “pak Kumis”. Berikut ini hasil wawancara dengan pak Kumis:

“dulu waktu remaja saya memang nakal sekali, karena faktor hubungan dengan orangtua saya juga tidak

harmonis. Saat itu memang saya sangat sangat bandel, kenakalan saya juga tidak berubah sampai saya menikah. Dan ketika saya menikah juga keadaan belum berubah, malah semakin hancur saja. Istri saya sudah lebih dahulu pergi meninggalkan saya. Keluarga saya saat itu benar-benar tidak mau lagi menerima saya. Tahun 2003 saya memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan anak-anak saya. Karena tidak berbekal pengetahuan dan keterampilan kerja yang saya miliki, saya mencoba kerja apa saja. mulai tahun 2003 saya hidup menggelandang, meminta-minta (ngemis) juga sering ngerongsokin barang-barang...”

Faktor pendidikan menjadikan Riana Fitri (19 tahun) hidup dijalan dan mengemis. Hal ini ia lakukan karena ia tidak masih kecil dan tidak memiliki keahlian dalam bekerja. Berikut hasil wawancara dengan Riana Fitri:

“dulu saya hidup di jalanan, di Tegal mbak. Ya nggak ngapa-ngapain ya minta-minta soale kalo ngamen juga susah dapetnya mbak. Bisa sampe sana awalnya karena diajak temen mbak, saya kan waktu itu pergi dari rumah umur 15an mbak, pokoknya tahun 2009. Perginya karena pertama masalah di sekolah, ya koyo ngono lah mbak. SMP kelas 3 sebulan lagi mau ujian. Pas di Tegal ya nggak bisa kerja mbak wong saya masih kecil, kalo mau ikut kerja orang alesanne semua karena masih kecil dan katanya karena nggak lulusan SMP jadi susah buat ikut kerja orang mbak... (wawancara dengan Riana Fitri di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I)”.

Demikian juga dengan lapangan pekerjaan yang minim yang dapat menjadi penyebab banyaknya kaum gelandangan dan hidup meminta-minta belas kasihan dari orang lain. Kurangnya lahan

pertanian, modernisasi teknologi, tenaga manusia beralih menggunakan tenaga mesin. Hal ini bukan hanya terjadi pada kegiatan industri dan perusahaan besar, namun industri rumah tangga saja sudah mulai beralih ke tenaga mesin yang dapat menggantikan peran tenaga manusia. Dalam kondisi inilah, membawa dampak bagi peluang kerja, terutama bagi orang yang sudah lanjut usia, orang yang hanya mengandalkan tenaga, tidak memiliki keterampilan kerja, bahkan pendidikan yang rendah semakin susah mendapatkan pekerjaan yang layak.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I

Pengemis di Pemalang memang menjadi masalah yang sangat kompleks. Dari data yang diperoleh dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tercatat hampir setiap tahun masalah pengemis selalu ada. Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pemalang Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5: Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pemalang Tahun 2012

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Lokasi Tempat Mengemis	Pengemis		
				L	P	Jumlah
1.	Moga	10	-	11	6	17
2.	Warungpring	6	-	3	2	5
3.	Pulosari	12	Pasar	8	14	22

4.	Belik	12	Pasar Kuta, Pasar Pon, Badak	2	0	2
5.	Watukumpul	15	-	3	0	3
6.	Bodeh	19	Pasar Comal	2	2	4
7.	Bantarbolang	17	Pasar Bantarbolang, Pasar Pagi Pemalang	2	1	3
8.	Randudongkal	18	-	3	3	6
9.	Pemalang	20	Jakarta, Desa antar Desa	48	45	93
10.	Taman	21	-	37	34	71
11.	Petarukan	20	Pasar Petarukan	13	8	21
12.	Ampelgading	16	Pasar Comal	1	1	2
13.	Comal	18	Keliling desa, Pasar Comal, perumahan dari desa ke desa	4	1	5
14.	Ulujami	18	-	3	3	6
Jumlah				143	120	263

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Untuk menanggulangi masalah pengemisan di Pemalang sendiri memang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, tidak hanya instansi pemerintahan namun juga didukung oleh partisipasi warga masyarakat Pemalang sendiri.

Berikut hasil wawancara dengan petugas Satpol PP Kabupaten Pemalang.

“...untuk sementara ini seperti yang saya lihat dan saya alami, masyarakat tidak pernah ada kepedulian dalam hal

penanggulangan ini. Justru kalau melihat kita (petugas Satpol PP) sedang merazia malah dilihatkan begitu saja, mereka nggak ikut serta membantu kita. Tapi kalo misalkan mereka (PGOT) dirasa sudah meresahkan warga, baru mereka melapor ke kita untuk ditindak lanjuti. Mungkin dengan adanya aduan dari masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pengemis di Pemalang sendiri...” (wawancara dengan bapak H. Kadir pada tanggal 23 April 2013).

Menurut Kadir selaku Kasi Ketertiban Satpol PP Pemalang bahwa selama ini belum ada partisipasi aktif dari masyarakat umum maupun LSM yang ikut bergabung dalam penanggulangan pengemis di Pemalang. Untuk menanggulangi pengemis di Pemalang sendiri Satpol PP Kabupaten Pemalang selaku eksekutor bekerjasama dengan Dinsosnakertrans, DKK, DPU, Polres, dan Kodim.

Hal ini dibenarkan oleh petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berikut ini hasil wawancaranya:

“...untuk masyarakat sendiri tidak ada partisipasinya. Cuma sekedar pengaduan masyarakat saja mengenai keberadaan pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT) baru nanti kita tindak lanjuti. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pengemis paling ya nanti ketika bimbingan dan pelatihan keterampilan untuk eks PGOT kita undang beberapa tokoh masyarakat untuk menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut...”(wawancara dengan bapak Supadi tanggal 18 April 2013).

Kesimpulan dari wawancara dengan dua informan diatas adalah bahwa tingkat partisipasi dari masyarakat Pemalang sangat minim. Hal ini sebatas berupa pengaduan masyarakat mengenai keberadaan pengemis,

gelandangan, orang terlantar (PGOT) yang dirasa mengganggu pemandangan kota.

“...kalau kata saya ya ada mbak. Saya sering dikasih kerja sama mereka, mereka pesen sapu lidi ke saya. Kadang jumlahnya banyak nyampe 10 sapu. Kaset yang saya buat juga kadang dibeli mereka. Dari situ kan saya berarti bisa kerja juga walaupun saya disini (Balai). Ya itung-itung kan berarti saya produktif kerja. Mereka juga kadang ngingetin kesaya nggak usah minta-minta lagi kalau sudah keluar dari sini (Balai), jangan hidup dijalan lagi. Kadang ada juga kumpulan ibu-ibu PKK atau nggak dari LSM yang sering kesini ngasih bantuan, kadang juga ngasih bimbingan atau ngadain pertemuan untuk sosialisasi. Ya lumayan buat nambah, kan bimbingan di Balai cuma itu-itu saja...”(wawancara dengan Teguh (39 tahun) penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang).

Walaupun sebatas memesan dan membeli hasil kerajinan dari penerima manfaat yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I, namun hal itu menurut Teguh (39 tahun) merupakan bentuk partisipasi masyarakat sekitar dalam membantu menanggulangi pengemis. Tidak hanya itu, terkadang masyarakat sekitar juga memberikan nasihat, masukan dan *wejangan* untuk dapat hidup lebih baik, hidup mandiri dengan usaha dan kerja keras diri dengan bekerja setelah keluar dari Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I.

Hasil wawancara dengan Abdul Afif juga menyatakan bahwa masyarakat sekitar tidak ikut aktif berpartisipasi dalam penanggulangan pengemis. Berikut hasil wawancara dengan Abdul Afif:

“partisipasine opo yo mbak, kalau saya sendiri sebagai masyarakat ya nggak ikut mbak, setau saya kok saya nggak pernah denger ada masyarakat yang ikut bantu di Balai Semekto Karti itu mbak. Saya mikirnya gini mbak, kan udah ada pemerintah yang bisa menangani, masyarakat ya paling nggak ikut partisipasinya. Malah saya ada harapan buat pengemis itu di kasih di bina dan diberi ketrampilan biar punya *skill* barangkali nanti bisa di aplikasikan. Kalau pengemis mengganggu atau memaksa ya enggak mbak. Mereka malah menurut saya itu lemah. Nah kan ketrampilan itu kan hanya usaha pemerintah untuk mengurangi pengemisan, biar bermanfaat diberi modal untuk kerja... (wawancara dengan bapak Abdul Afif pada tanggal 20 April 2013)”.

Menurut Abdul Afif bahwa partisipasi aktif dari masyarakat tidak ada. Hal ini lebih dikarenakan karena semua urusan penanggulangan pengemisan sudah ditangani oleh pemerintah dan itu merupakan tanggungjawab pemerintah. Masyarakat tidak harus ikut aktif dalam upaya penanggulangan tersebut.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, peneliti mewawancarai Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I dan petugas Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”:

“Partisipasi masyarakat sekitar tidak ada. Semua tindakan pelayanan dan bimbingan murni dilakukan oleh petugas dari Balai. Kerjasama yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I langsung bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah karena kami UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Untuk pelatih ketrampilan menjahit sendiri memang kita datangkan dari luar, namun kita bayar mereka untuk melatih PM disini. Kalaupun ada partisipasi dari masyarakat ya mungkin nanti setelah purna bina. Biasanya dari Dinas Sosial Kabupaten Pemalang

melakukan bimbingan bagi eks PGOT. Mungkin ada partisipasi dari tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan pengemisan di Pemalang” (wawancara dengan bapak Agus Kepala Balai Rehabilitasi Sosial samekto Karti Pemalang I pada tanggal 22 April 2013).

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan bapak Agus dijelaskan oleh bapak Ngadino. Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Ngadino:

“ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Terutama adanya pengakuan terhadap Balai ini. Tidak ada yang *complain*. Justru kadang mereka mengikutsertakan PM (penerima manfaat) dengan warga untuk kerja bakti desa. Kemudian manakala ada kelayan (penerima manfaat) ada yang meninggal dunia mereka juga ikut serta mengurus jenazahnya, nah dari pihak desa sendiri memang memberikan kapling makam sendiri untuk warga Balai yang meninggal. Kemudian hasil karyadari PM juga dititipkan ditoko-toko dan warug-warung warga, terkadang juga di pasar pagi Pemalang atau di pasar Comal. Partisipasi lain ya nanti mbak setelah purna kemudian ada penyaluran kerja biasanya pengusaha-pengusaha konveksi disekitar sini mau menerima PM dari sini untuk kerja, tapi biasanya yang diterima ya yang masih muda-muda mbak, kalau yang sudah sepuh (tua) biasanya mereka kembali ke keluarga...”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh ibu Rustinawati dan bapak

Wardi'in. berikut hasil wawancara dengan keduanya:

“kalau disina ya karena disini itu Balai Rehabilitasi, partisipasi daripada masyarakatnya tidak banyak seperti yang ada di Unit kita (Unit Bisma Upakara). Partisipasinya missal mereka menemukan orang terlantar itu mereka menyerahkan ke Balai. Biasanya dari Pabrik Gula Sragi memberikan bantuan sembako mbak, kalo PG.Sragi sering ya, hampir rutin memberikan bantuan sembako. Kemudian dari ibu-ibu dharma wanita (ibu Persit) juga pernah kesini bawa sembako dan kasih pelatihan ketrampilan juga selama satu hari. Untuk LSM sendiri jarang mbak, kemarin-kemarin ada dari

Pekalongan datang kesini. Kalau masyarakat sekitar sini ya ada mbak, bina lingkungan lah istilahnya, kerja bakti sama-sama masyarakat. Satu lagi mbak, kalo tiap jumat pagi itu dua minggu sekali ada instruktur senam, itu mbak Rina namanya yang datang kesini ngasih bimbingan fisik berupa senam”.

Dari hasil wawancara dengan delapan informan diatas jelas bahwa untuk menanggulangi masalah pengemisan di Pemalang sendiri memang menjadi tugas dan tanggungjawab bersama. Namun dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I dalam upaya penanggulangan pengemisan cukup ikut berpartisipasi. Dari masyarakat sekitar Balai sendiri lebih mengedepankan kepada bantuan dan kerjasama dari penerima manfaat dengan warga melalui kegiatan-kegiatan desa dengan ikut serta dalam kegiatan bina lingkungan dalam hal ini kegiatan kerja bakti dan gotong royong, ikut membantu manakala kelayan Balai mengalami musibah, serta membantu memasarkan hasil kerajinan mereka dengan cara menitipkan di toko-toko dan warung-warung yang ada di sekitar Balai, serta di pasar pagi Pemalang dan pasar Comal, pengusaha-pengusaha konveksi disekitar Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” ikut membantu memberi pekerjaan terhadap penerima manfaat yang telah purna bina untuk ikut bekerja di industri usahanya.

Partisipasi lain juga muncul dari kelompok-kelompok masyarakat, LSM, persatuan ibu-ibu Dharma Wanita, serta perusahaan atau pabrik-pabrik. Bentuk partisipasi yang diberikan cukup beragam. Umumnya

mereka memberikan bantuan berupa sandang dan pangan, dalam hal ini berupa pemberian bantuan sembako. Pelatihan keterampilan memasak dan keterampilan anyam-anyaman juga diberikan oleh persatuan ibu-ibu Dharma Wanita. Setiap dua minggu sekali penerima manfaat mendapatkan bimbingan fisik berupa senam pagi dari instruktur senam yang secara rutin datang ke Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I untuk memberikan bimbingan fisik berupa senam pagi.

Dalam kegiatan bimbingan sosial, latihan keterampilan dan pendampingan sosial bagi eks PGOT juga terdapat adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Kegiatan tersebut berada di bawah komando Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang yang bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah yang lain yang didukung dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat datang dari perkumpulan ibu-ibu PKK yang ikut serta memberikan bimbingan pelatihan Usaha Ekonomi Produktif yang berguna dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi kelak.

Dari banyaknya partisipasi yang datang dari berbagai pihak dan berbagai macam bentuk partisipasi, dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan yang paling sering dan rutin diberikan adalah partisipasi dari perusahaan / pabrik dengan memberikan bantuan berupa sembako kepada Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”. Selain itu bantuan untuk memasarkan hasil kerajinan tangan hasil karya dari penerima manfaat oleh masyarakat sekitar balai yang memiliki warung dan toko. Sedangkan untuk bentuk

partisipasi berupa pelatihan-pelatihan / keterampilan masih kurang dan masih jarang.

4. Upaya-Upaya Rehabilitasi Pengemis oleh Balai Rehabilitasi Sosial

“Samekto Karti” Pemalang I Untuk Merehabilitasi Pengemis

Seperti yang disebutkan dalam visi dari Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti adalah “Terwujudnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang semakin mandiri dan sejahtera” maka hal ini perlu adanya upaya-upaya rehabilitasi guna mengubah kehidupan bagi para pengemis untuk dapat hidup lebih baik dan berfungsi sosial. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan rehabilitasi pengemis adalah sebagai berikut:

a. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I, yaitu:

1) Rehabilitasi perilaku

Rehabilitasi perilaku adalah bagian dari proses rehabilitasi sosial melalui pelayanan perubahan perilaku baik berupa pendidikan bela negara maupun bimbingan mental lainnya agar siap menerima kegiatan selanjutnya. Berikut hasil wawancara dengan ibu Rustinawati:

“ya mbak, rehabilitasi perilaku kan misalnya dengan kegiatan bela negara, kemudian bimbingan mental dan sosial. Bimbingan mental sendiri misal dengan pembinaan keagamaan nanti yang ngisi ada dari staf KUA Kecamatan

Ampelgading setiap hari Rabu. Kalau bela negara sendiri setiap hari Selasa dan Kamis oleh anggota Koramil Kecamatan Ampelgading dan Polsek Kecamatan Comal. Kemudian juga ada dinamika kelompok yang dibimbing langsung oleh kita (petugas Balai)”.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Wardi'in. berikut

hasil wawancaranya:

“hubungan dengan instansi-instansi lain juga bagus. Ada pembinaan dari KUA kecamatan Ampelgading itu pembinaan agama, terus juga Koramil, Kepolisian. Koramil dan Kepolisian ini biasanya gentian tiap minggunya mbak. Kadang diselingi dengan senam pagi sebelum kegiatan.

2) Rehabilitasi sosial psikologi

Rehabilitasi sosial psikologi merupakan bagian dari proses rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin mengembalikan kondisi mental psikologi dan sosial agar mapu melaksanakan fungsi sosialnya di dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan bapak Ngadino:

“tugas saya ini mbak sebagai staf penyantunan untuk memberikan pendidikan, pembinaan sosial, pembinaan psikologis, sopan-santun, etika dan moral. Karena mereka sebelumnya kan yang hidup dijalan, biasanya mereka tidak punya unggah-ungguh, sopan-santun, nah disini mereka diberi bimbingan agar kelak setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat mereka dapat mengerti unggah-ungguh dan sopan-santun terhadap orang lain”.



Gambar 3: Kegiatan Pembinaan Etika dan Moral di Aula Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”

Sumber: Dokumen Foto Rizki Amalia

3) Rehabilitasi karya

Rehabilitasi karya adalah bagian dari rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan agar sasaran penanganan dapat menjadi manusia produktif sehingga mampu menolong dirinya sendiri dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Wardi'in.

berikut hasil wawancaranya:

“disini mereka mendapat pelatihan pembuatan kerajinan-kerajinan mbak. Untuk kesibukan mereka sehingga ada kerjaan juga. Seperti ini pelatihannya mbak, ada buat keset, menjahit, terus bikin tas belanja, bikin sapu lidi juga, terus lagi ada pertanian di belakang sana. Setiap kegiatan tergantung minat dan bakat dari PM (penerima manfaat) sendiri mbak. Mereka bisa memilih mau ketrampilan apa, tidak di paksa”.

Seperti penjelasan dari penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”. Berikut hasil wawancara dengan mbak Istiati:

“ kalo pelatihan lumayan banyak mbak, saya sendiri ikutnya menjahit setiap hari Senin sama Rabu di ruang depan sana. Pelatihannya ya ada njahit, bikin keset, bikin bantal-bantal kursi dan bantal tidur, pertanian, ada pelatihan dari pak TNI juga mbak, kayak senam gitu. Kalo bikin keset itu lumayan cepet mbak, kan bisa dikerjain di *cottage* juga. Kalo njahit kan harus di ruangan sana, jadi kalo ruangnya tutup ya nggak bisa njahit mbak”.

4) Rehabilitasi pendidikan

Rehabilitasi pendidikan juga merupakan bagian dari rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan penambahan pengetahuan melalui *upgrading* dan *refreshing* untuk mendukung pengambilan dan menentukan bentuk jenis ketrampilan. Berikut hasil wawancara dengan bapak Wardi'in:

“ untuk *upgrading* dan *refreshing* jenis ketrampilan ya hanya itu tadi mbak, ketrampilan buat keset, tas belanja, menjahit, pertanian, yang lainnya pernah ada tapi berhenti karena tidak ada peminatnya. Dari kita pihak Balai kemudian mendatangkan tenaga ahli untuk mengajari PM. Seperti menjahit dan pertanian kita panggil tenaga ahli dari luar. Untuk kerajinan yang lain, petugas Balai yang membimbing dan mengawasi”.

Dari keempat jenis pelayanan yang diberikan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I tersebut, diharapkan

bahwa mereka bisa masuk kedalam dunia ekonomi setelah mereka mendapatkan bekal ketrampilan. Seperti yang dijelaskan bapak Agus dalam wawancaranya. Berikut wawancara dengan bapak Agus:

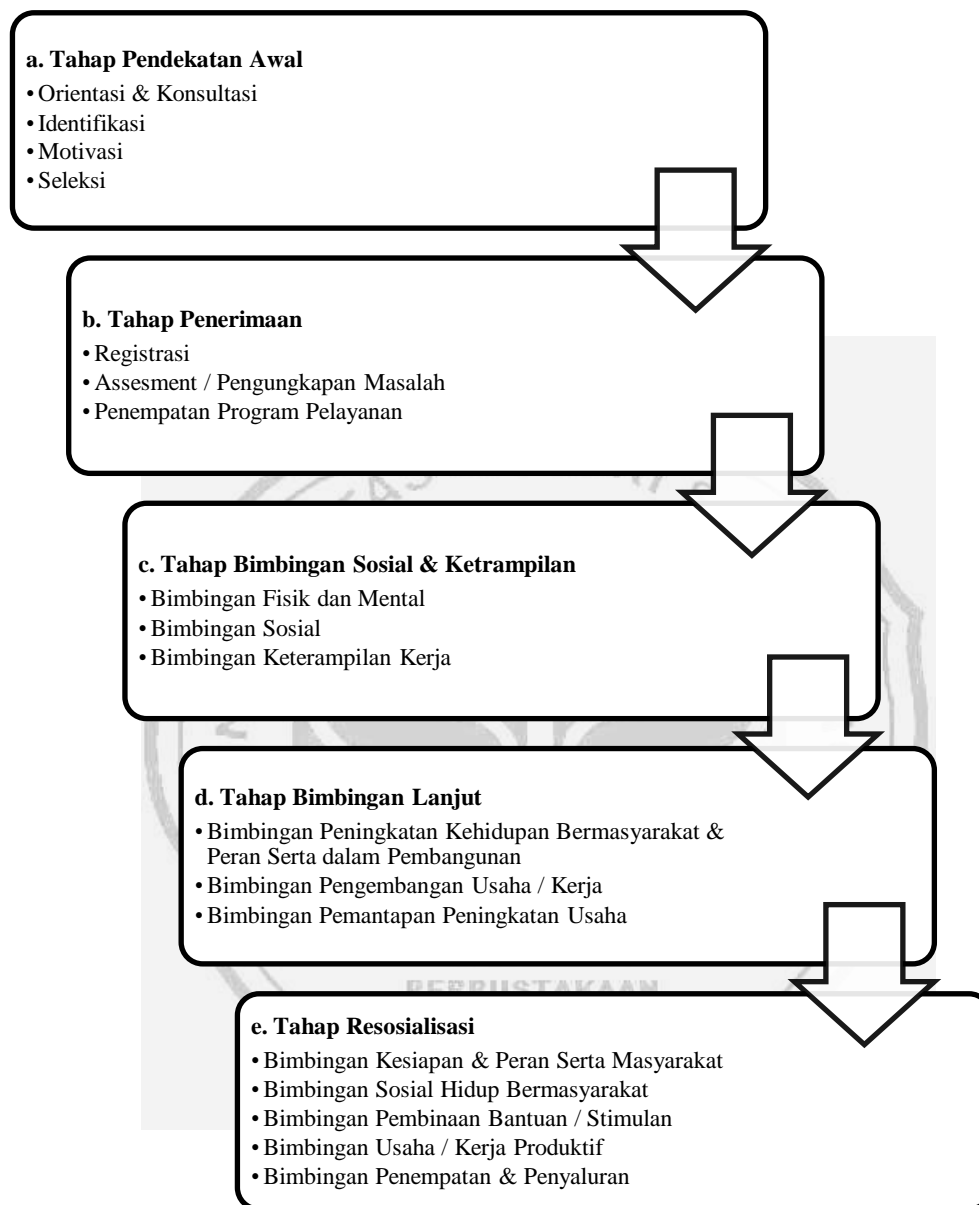
“dengan upaya rehabilitasi ini memberikan bekal kepada mereka kelak setelah keluar dari sini, dari aspek pendidikan. Dari aspek ekonomi juga begitu, dengan memiliki ketrampilan dia bisa masuk ke dunia ekonomi untuk mendapatkan pekerjaan. Dari aspek bimbingan sosial mental entah itu mental psikologis, mental kepribadian, mental agama, mental ideologi, diharapkan *mindsetnya* berubah”.

b. Mekanisme Kerja Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”

Pemalang I

Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang mempunyai peran, yaitu: menumbuhkembangkan prakarsa dan peran aktif, mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam hal ini yaitu pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT). Sehingga mereka dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dalam upaya memaksimalkan peranannya, Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang melakukan proses pelayanan dan rehabilitasi secara terstruktur. Berikut adalah alurnya:

Bagan 3: Mekanisme Kerja Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti



1) Tahap Pendekatan Awal

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain: orientasi dan observasi yang melibatkan pekerja sosial masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang berfungsi untuk membantu memecahkan masalah calon penerima manfaat, identifikasi guna mendapatkan data

dan identitas calon penerima manfaat, motivasi dan penyuluhan dengan memberikan penjelasan dan dorongan tentang program bimbingan sosial di Balai Rehabilitasi, dan seleksi calon penerima manfaat yang berguna untuk dapat menentukan dan menetapkan calon penerima manfaat yang tepat.

Calon penerima manfaat diwajibkan membawa persyaratan

masuk. Antara lain:

1. WNI
2. Usia 20 s/d 59 tahun
3. Sehat jasmani dan rokhani, tidak cacat yang mengganggu aktivitas, tidak berpenyakit kronis atau menular (Rekomendasi dari Dinas Kesehatan)
4. Tidak sedang berurusan dengan aparat penegak hukum
5. Surat penjanjian penerimaan dan penyerahan kembali penerima manfaat pada keluarga
6. KTP
7. KK
8. Surat nikah (bila sepasang)
9. Poto 3x4 (2 lembar)
10. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
11. Surat Keterangan dari Satpol PP
12. Surat Keterangan dari Kepolisian

Apabila dari persyaratan-persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi seluruhnya oleh calon penerima manfaat, minimal calon penerima manfaat memiliki kartu identitas diri dan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Surat Keterangan dari kepolisian.

2) Tahap Penerimaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

a) Registrasi

Setelah persyaratan-persyaratan calon penerima manfaat dilengkapi, petugas melakukan pencatatan identifikasi penerima manfaat secara akurat dan dimasukkan dalam file sebagai dokumen, antara lain: pencatatan dalam buku induk, penandatanganan kontrak pelayanan, penetapan tertulis diterimanya calon penerima manfaat.

b) Assessment / Pengungkapan Masalah

Pengungkapan masalah dilakukan untuk mendapatkan data masalah dan potensi, pembuatan *case study* pada setiap bentuk penelaahan permasalahan, menentukan program permasalahan yang tepat.

c) Penempatan Program Pelayanan

Kegiatan penempatan program pelayanan Balai antara lain: pengasramaan penerima manfaat, memperkenalkan program kegiatan yang akan diterima penerima manfaat,

resosialisasi penyesuaian diri dalam Balai, pengembangan minat dan bakat penerima manfaat, penyaluran pada bidang informal sesuai minat dan bakatnya, pembekalan penerima manfaat purna bina.

3) Tahap Bimbingan Sosial & Keterampilan

a) Bimbingan fisik, mental dan sosial

Bimbingan Fisik bagi penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti antara lain:

1. Pemeliharaan kebersihan diri dan lingkungan dan olahraga rutin setiap pagi. Kegiatan ini diawasi dan ditangani oleh petugas Balai.
2. Bimbingan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Pengecekan kesehatan biasanya dilakukan setiap satu bulan sekali oleh tim medis dari Puskesmas Kecamatan.
3. Pemenuhan kebutuhan makan, minum, sandang, pangan, dan kesehatan penerima manfaat.
4. Senam sehat yang dilakukan setiap hari. Senam sehat dilaksanakan bersama dengan petugas Balai sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan, senam bersama dengan anggota Koramil dan Kepolisian,

serta mendatangkan instruktur senam setiap hari jum'at.

b) Bimbingan Mental dan Sosial bertujuan untuk membentuk kembali mental penerima manfaat untuk dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan sifat dan sikap perilaku yang baik dan bertanggung jawab sehingga mempunyai kemampuan dan kesiapan untuk menyongsong masa depannya kembali. Adapun kegiatan mental dan sosial yang dilakukan antara lain:

1. Pembinaan keagamaan

Berupa bimbingan mental, akhlak, budi pekerti luhur, belajar sholat dan praktek pelaksanaan sholat. Hal ini dilakukan untuk mempertebal keimanan, memperkuat keyakinan dan memberikan ketenangan hati. Kegiatan pembinaan keagamaan diberikan setiap hari Rabu oleh staf KUA Kecamatan Ampelgading.

2. Dinamika kelompok dan Terapi kelompok

Kegiatan kelompok ini bertujuan untuk membentuk sikap kerjasama antar penerima manfaat agar penerima manfaat dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pembinaan ini dilakukan untuk kepentingan bersama di asrama maupun lingkungan. Dari hasil observasi peneliti, bentuk kerjasama

kelompok yang berlangsung di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti hanyalah sebatas kegiatan kebersihan lingkungan Balai dan kegiatan olahraga saja. Peneliti tidak menemukan adanya kegiatan kelompok dalam bidang kesenian maupun rekreasi.

3. Kewarganegaraan / Bela Negara

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada negara, menumbuhkan keberanian diri, dan menumbuhkan sikap kepemimpinan kepada mereka.

Kegiatan ini mendapat bimbingan langsung anggota Koramil dan Polsek Kecamatan Comal yang dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis.

4. Apel Pagi

Kegiatan ini dilakukan untuk membentuk, memupuk dan mengembangkan sikap patuh dan disiplin diri.

Apel pagi dilaksanakan setiap hari pukul 07.00 sebelum penerima manfaat melaksanakan kegiatan

pembinaan. Apel pagi dipimpin oleh petugas Balai.

c) Bimbingan keterampilan kerja

(1) Pertukangan

Kegiatan pertukangan yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” untuk saat ini tidak berjalan. Keterampilan pertukangan semakin kurang

diminati oleh penerima manfaat mengingat ketrampilan ini memang membutuhkan keahlian dan kerja keras dalam mempelajarinya. Berikut hasil wawancara dengan bapak Kumis:

“...dulu setelah saya pindah dari Mardi Utomo saya meneruskan di sini (Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”) dulu pernah ada dek pelatihan pertukangan kayu, saya sempet mengikuti disini karena juga dari Mardi Utomo dapet itu. Disini lumayan lama dapet bimbingan itu, setelah saya purna keluar dari sini juga dibekali seperangkat alat-alat pertukangan dek, jadi sebetulnya ya sangat bermanfaat sekali. Cuma waktu saya balik lagi kesini kok ternyata pelatihan pertukangan sudah tidak ada, katanya sih nggak ada peminatnya, seperti itu...” (wawancara dengan penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I).

(2) Menjahit

Kegiatan menjahit ini mendapat bimbingan dari ibu Mutmainah. Berikut hasil wawancara dengan ibu Mutmainah:

“...jadwal pelatihan menjahit dilaksanakan seminggu 2 kali. Hari Senin dan Rabu pukul 10.00 sampai 11.30. Antusias dari penerima manfaat untuk keterampilan menjahit lumayan banyak mbak, sedikitnya ada 6 orang yang ikut dalam kelas menjahit. Kan tergantung pada minat mereka, jadi tidak dipaksakan...” (wawancara dengan pelatih ketrampilan menjahit di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”).



**Gambar 4: kegiatan menjahit di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”
Sumber: Dokumen Foto Rizki Amalia**

(3) Kerajinan tangan (pembuatan keset kain perca dan tas belanja)

Kegiatan pembuatan keset kain perca dan tas belanja dilaksanakan dengan bimbingan dari petugas Balai. Bimbingan Kerajinan pembuatan tas belanja dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis. Sedangkan untuk bimbingan pembuatan keset kain perca dilakukan setiap hari Senin dan dapat dikerjakan ketika sela waktu menganggur dari penerima manfaat. Selain itu juga diberikan bimbingan pembuatan bantal.



**Gambar 5: kegiatan membuat kerajinan tangan (tas belanja dan keset kain perca) di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”
Sumber: Dokumen Foto Rizki Amalia**

(4) Pertanian dan perkebunan

Kegiatan pertanian dan perkebunan memanfaatkan lahan yang ada di Balai. Pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan bermacam-macam jenis misalnya tanaman palawija, tanaman obat-obatan, tanaman buah-buahan. Kegiatan ini mendapat bimbingan dari BPP Kecamatan Ampelgading setiap hari Selasa.



Gambar 6: kegiatan pertanian dan perkebunan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”

Sumber: Dokumen Foto Rizki Amalia

(5) Perikanan

Dari hasil observasi penelitian, kegiatan perikanan sudah tidak lagi berjalan. Dikarenakan tidak adanya pembimbing dan tidak adanya minat dari penerima manfaat.

4) Tahap Bimbingan Lanjut

Penyelenggaraan pelayanan di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti ini bermuara pada terentaskannya kemandirian penerima manfaat dari masalah sosial, kemiskinan, keterlantaran. Pada tahap bimbingan lanjut ini, penerima manfaat diserahkan kembali kepada keluarga / masyarakat / Pemerintah Kabupaten / Kota dengan menggunakan Berita Acara. Dalam tahap ini, penerima manfaat masih

mendapatkan bimbingan lanjut dari Balai Rehabilitasi berupa pemantauan diri pasca pengembalian.

Dalam Tahap Bimbingan Lanjut, kegiatan yang dilakukan antara lain: bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat & peran serta dalam pembangunan, bimbingan pengembangan usaha / kerja, bimbingan pemantapan peningkatan usaha.

5) Tahap Resosialisasi

Tahap ini merupakan kesatuan dari tahap Bimbingan Lanjut. Terdiri dari: Bimbingan Kesiapan & Peran Serta Masyarakat, Bimbingan Sosial Hidup Bermasyarakat, Bimbingan Pembinaan Bantuan/Stimulan, Bimbingan Usaha / Kerja Produktif, dan Bimbingan Penempatan & Penyaluran. Tahap Resosialisasi dimaksudkan memberikan bimbingan kesiapan diri. Pengembalian dilakukan untuk mendapatkan kembali kemandirian diri dan untuk mendapatkan kembali identitas diri pasca rehabilitasi.

Dari hasil bimbingan lanjut, sejumlah 17 eks penerima manfaat (purna bina) sebagai sasaran kegiatan dapat disimpulkan bahwa 100% mereka telah kembali ke keluarga dan masyarakat dan telah bekerja mandiri mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan mereka telah dapat membantu kehidupan perekonomian keluarga.

c. Kinerja Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti dalam Upaya Rehabilitasi Pengemis

Kinerja Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para gelandangan, pengemis, dan orang terlantar agar mampu mandiri, percaya diri serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Untuk mengungkap kinerja Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) penerima manfaat dalam Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I

Wawancara kepada penerima manfaat dalam Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I dilakukan kepada Yulianto, Riana Fitri, Abdul Rohman, dan Yaemah.

Berikut ini hasil wawancara dengan keempat penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I:

“...tadinya saya minta-minta sama suami saya di Batang. Terus suatu hari saya diajak pergi sama suami saya, bilanganya sih mau ikut program transmigrasi tapi ternyata malah ke sini (Balai) mbak. Waktu itu tahun 2001 saya masuk ke sini (Balai) terus disalurkan ikut

trans ke Aceh. Waktu itu kan pas geger bencana tsunami tahun 2003. Saya selamat, tapi sebelum kejadian itu saya sudah ditinggal pergi suami saya. Setelah itu sempat di Lampung dulu lama. Saya bisa pulang lagi ke Jawa, terus ikut kakak saya di Batang. Karena pekewuh ikut terus, saya mutusin buat pergi dan kerja lagi (minta-minta). Saya coba untuk kembali lagi kesini (Balai) ternyata saya diperbolehkan masuk kesini lagi sama pak kepala. Disini ya saya kembali ikut bimbingan-bimbingan mbak. Kalaupun nanti ada penyaluran, saya pengen disalurkan kerja saja, nggak mau ikut trans lagi..."(Wawancara dengan Yaemah (40 tahun) tanggal 11 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I memberi dukungan terhadap penerima manfaat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Terbukti bahwa Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti juga menyalurkan *eks* penerima manfaat untuk mengikuti program transmigrasi.

"Perannya disini sangat membantu sekali dek. Ya daripada diluar sana kan mending disini dapet tempat tinggal, dapet keterampilan juga, saya ambil pertukangan waktu itu. Cuma saya kan disini nggak sampai purna bina cuma 7 bulan, karena ikut tenaga kerja ke Kalimantan. Waktu itu juga dapat bekal alat-alat pertukangan juga, tapi saya jual alat-alatnya. Terus balik lagi ke Jawa, coba ikut kerja serabutan di pelabuhan. Kepikiran lagi untuk kembali kemari (Balai) dan sampai sekarang ya saya disini. Ada setelah saya purna dari sini nanti saya pengen mencoba hidup baik lagi, cari kerja sama kembali ke keluarga ikut anak-anak saya lagi (wawancara dengan pak Kumis (50 tahun) di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti tanggal 11 April 2013).

Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti memberikan pelatihan dasar kepada penerima manfaat berupa pemberian keterampilan yang diharapkan dapat bermanfaat. Penerima manfaat dapat mandiri sesuai dengan keterampilan yang telah diberikan dalam Balai.

“disini ya dibuat seneng aja mbak. Dari petugasnya juga enak-enak aja kalo diaja cerita (curhat) juga enak, nanti kadang dapet nasehat. Kadang ada juga sih yang nyebelin suka marah-marah. disini saya beruntung mbak, karena selain dapat keterampilan dan bimbingan-bimbingan, saya bisa dapat binaan agama juga. Karena jujur saya nggak ngerti agama, nggak bisa ngaji, nggak pernah sama sekali sholat. Setelah disini ya saya bisa sedikit, udah mulai rajin sholatnya. Punya harapan buat berubah juga, karena nantinya saya sudah siap untuk bekerja nggak kayak dulu lagi (ngemis)di jalan (wawancara dengan Yulianto (30 tahun) pada tanggal 11 April 2013).

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa kinerja dari Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti sendiri memang mengutamakan perubahan hidup yang lebih mandiri dan lebih baik lagi. Tidak hanya kinerja dalam memberikan bimbingan dan pelatihan saja, namun juga pelayanan petugas Balai terhadap penerima manfaat juga tetap diutamakan.

“Kegiatan saya menjahit, buat keset. Kalo buat keset bisa tiap hari ngerjain, kalo ada waktu luang daripada nganggur bisa ngerjain di *cottage*. Disini ya ada senengnya ada enggaknya, susah ya mbak kalo ditanya

gitu. Senengnya kalo ada yang perhatian sama saya, kalo saya curhat bisa nyambung, sayanya seneng. Nggak senengnya ya disini kan nggak cuma PGOT, kan ada psikotik juga. Juga kadang ada pegawai yang nggak adil juga memperlakukan PM disini. Kalo pas nyuruh-nyuruh kebersihan biasanya (wawancara dengan Riana Fitri di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diberikan dan didukung dengan motivasi para penerima manfaat, pelatihan dan bimbingan dapat disampaikan dengan baik. Kinerja Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti bukan hanya kinerja petugas balai, atu pembimbing, melainkan membutuhkan kerjasama yang baik dengan penerima manfaat sehingga tujuan yang ingin dicapai bersama dapat tercapai dengan baik.

2) Petugas Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I

Kinerja Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti juga dapat dinilai berdasarkan tanggapan dari petugas balai. Berikut ini hasil wawancara dengan ibu Rustinawati dan bapak Ngadino:

“Disini merupakan tempat pelatihan, peran balai disini kan harus bisa merubah gaya hidup mereka (penerima manfaat). Setelah mempunyai bekal pembinaan dari sini diharapkan setelah keluar dari balai ini dapat hidup mandiri. Target penerima manfaat sendiri dilihat dari selama mereka menngikuti bimbingan dan pelatihan mereka bisa menguasai materi, menguasai keterampilan, dan bisa kembali ke masyarakat pasti target itu akan tercapai (wawancara dengan ibu Rustinawati).

“...untuk penilaian peran Balai ataupun kinerja Balai sendiri itu kan subjektif. Tidak hanya satu orang saja yang dapat menilai. Menurut saya sendiri kinerja balai sendiri sudah sangat meningkat, ya bisa dikatakan berada di tengah-tengah. Dilihat dari sarana fisik yang sekarang sudah semakin bertambah. Namun saya rasa sarana yang ada belum cukup memadai, walaupun ada peningkatan tapi belum lengkap. Misalnya gedung untuk klinik dan tenaga medis. Untuk kinerja dari petugas ke penerima manfaat sendiri dilihat dari jumlah pegawai lebih banyak artinya pelayanan kepada penerima manfaat bisa lebih maksimal (wawancara dengan bapak Ngadino).

Dari hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa kinerja Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT) bertujuan agar mampu mandiri, percaya diri serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Hal ini didukung dengan adanya sarana prasarana fisik maupun SDM yang memadai.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang melakukan pendekatan-pendekatan kepada penerima manfaat. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan, yaitu: (1) pendekatan humanis artinya menerima kelayan / penerima manfaat tanpa memandang status sosial. (2) pendekatan individualis artinya memandang kelayan / penerima manfaat sebagai pribadi yang unik dilihat dari tingkah laku dan sikap mereka selama ini. (3)

pendekatan kepada sikap tidak menghakimi. (4) pendekatan rasional. Apa yang diberikan kepada penerima manfaat harus objektif dan sesuai logika. (5) pendekatan empati. Merasakan seperti mereka (asah asih asuh) dengan cara mengikuti alur hidup mereka. (6) pendekatan kejujuran. Dalam hal ini berguna untuk pengungkapan masalah.

3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Pemalang:

“Samekto Karti merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dari kami (Dinas Sosial) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Samekto Karti. Kerjasamanya berupa pengiriman PGOT dengan membuat Surat Rekomendasi dari kami (Dinas Sosial). Setelah dikirim ke Samekto Karti kemudian didata dan diserahkan ke Dinas Sosial kabupaten Pemalang. Disana nanti mendapat pelayanan dan bimbingan terlebih dahulu, baru setelah purna bina dari kami (Dinas Sosial) melakukan pembinaan keterampilan untuk mereka (wawancara dengan bapak Supadi).

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti telah sesuai dengan tujuannya yaitu membentuk sikap mandiri, percaya diri serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam wawancara tersebut lebih menggambarkan kepada kerjasama antar keduanya. PGOT kiriman dari Dinas Sosial Kabupaten Pemalang kemudian dikirim ke Balai

Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I untuk mendapatkan pelayanan dan bimbingan. Setelah mampu hidup mandiri kemudian dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pemalang untuk kemudian kembali menerima pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pemalang.

d. Hasil yang dicapai dari Pelayanan Rehabilitasi Pengemis

Hasil Pelayanan Kesejahteraan Sosial ini adalah adanya perubahan penerima manfaat, antara lain: penerima manfaat dapat melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan peran dan fungsi sosialnya dengan baik, terpenuhinya kebutuhan pokok mereka (penyaluran kerja serta pemberian alat-alat perlengkapan untuk menunjang mereka bekerja), tersalurkannya bakat, minat dan kemampuannya secara baik. Data Purna Bina Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I dapat di lihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Data Purna Bina Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I

No.	Nama	Umur		Alamat	Jenis PKMS	Ket.
		L	P			
1.	M. Faik	32		Ds. Ujunggede Rt 02/Rw 04 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali
2	Turmono	35		Dk. Posongan Rt 01/Rw 03 Kec. Comal	PGOT	Kembali
3	Subadi	46		Ds. Ujunggede Rt 02/Rw 04 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali

4	Siswanto	35	Ds. Jatitejo Rt 02/Rw 03 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali
5	Eko Marijo	20	Ds. Ujunggede Rt 02/Rw 03 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali
6	Haryono	46	Dk. Posongan Rt 02/Rw 04 Kec. Comal	PGOT	Kembali
7	Gesang Samekto	25	Dk. Plondongan Rt 03/Rw 04 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali
8	Mujiono	35	Ds. Ampelgading Rt04/Rw 03 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali
9	Tumino	45	Ds. Gintung Rt 04/Rw 01 Kec. Comal	PGOT	Kembali
10	Ponimin	50	Dk. Plondongan Rt 03/Rw 04 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali
11	Suparno	50	Dk. Plondongan Rt 03/Rw 04 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali
12	Sujai	47	Ds. Banglarangan Rt 14/Rw04 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali
13	Bejan	48	Dk. Plondongan Desa Losari Rt 03/Rw 06	PGOT	Kembali
14	Sutoro	49	Dk. Plondongan Rt 03/Rw 04 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali
15	Sumadi	50	Dk. Plondongan Rt 03/Rw 04 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali
16	Warnoto	35	Ds. Ujunggede Rt 06/Rw04 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali
17	Aji	35	Ds. Ujunggede Rt 07/Rw 02 Kec. Ampelgading	PGOT	Kembali

(Sumber: Data hasil penelitian Rizki Amalia, 15 April 2013)

Pengembalian penerima manfaat kedalam kehidupan dan penghidupan di masyarakat secara baik di lingkungan keluarga dan masyarakat dilakukan setelah klien menerima pelayanan dan rehabilitasi selama maksimal 1 tahun di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I. Pengembalian dapat dilaksanakan secara langsung dengan mengembalikan kepada keluarga dapat pula melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

Tahapan purna bina bagi penerima manfaat pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT) di dalam pelayanannya tidak perlu menunggu sampai jangka waktu maksimal 1 tahun. Akan tetapi dapat purna bina jika berdasarkan hasil Studi Kasus telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang membaik sesuai norma dan etika yang berlaku dalam kehidupan, dapat mandiri dan bisa lebih produktif.

Dalam tahap bimbingan lanjut purna bina, Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinsosnakertrans Kabupaten Pemalang dalam pemberian Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan dan Pendampingan Sosial bagi eks PGOT.



Gambar 7: Kegiatan Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan bagi eks PGOT

Sumber: Dokumen Foto Rizki Amalia

Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 eks PGOT dari 2 Kecamatan di kabupaten Pemalang, yaitu Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Comal. Dalam kegiatan tersebut, eks PGOT mendapatkan bimbingan pengarah dan pelatihan dari berbagai instansi pemerintahan. Salah satunya yaitu bimbingan mental dan spiritual dari KUA, pengetahuan masalah sadar hukum oleh POLSEK, dan bimbingan latihan kerja serta usaha ekonomi produktif oleh Balai Latihan Kerja (BLK). Daftar nama peserta kegiatan penjangkaran dan pendampingan bagi eks PGOT dan kelompok rentan lainnya Kabupaten Pemalang tahun 2013 dapat di lihat pada Tabel 7.

Tabel 7: Daftar Nama Peserta Kegiatan Penjaringan dan Pendampingan Bagi eks PGOT dan Kelompok Rentan Lainnya Kabupaten Pemalang Tahun 2013

No.	Nama	Umur (Tahun)	Alamat	Usulan
1.	Susyanto	35	Rt.02/05 Ds. Susukan Kec. Comal	Mesin jahit dan perlengkapannya
2.	Siti Alfiah	31	Rt.01/03 Ds. Klegen kec. Comal	Mesin jahit dan perlengkapannya
3.	Tarliyah	28	Rt.04/04 Ds. Tumbal Kec. Comal	Kambing
4.	Dahuri	33	Rt.03/04 Ds. Gandu Kec. Comal	Gerobak dan kompor gas
5.	Susmono	23	Rt.13/03 Ds.Kandang Kec.Comal	Mesin jahit dan perlengkapannya
6.	Turaino	53	Rt.07/02 Ds.Gintung Kec. Comal	Mesin parut kelapa
7.	Wiyatno	33	Rt.04/05 Ds.Sidorejo Kec.Comal	Mesin jahit dan perlengkapannya
8.	Mujiono	33	Rt.04/03 Ds.Ampelgading Kec.Ampelgading	Kambing
9.	Sunadi	51	Rt.06/03 Ds.Losari Kec.Ampelgading	Mesin jahit dan perlengkapannya
10.	Sutoro	55	Rt.06/03 Ds.Losari Kec.Ampelgading	Beras 1 Kwintal, sarimi 2 dus, minyak goreng 20 kg
11.	Poniman	55	Rt.06/03 Ds.Losari Kec.Ampelgading	Kambing
12.	Siswanto	39	Rt.03/01 Ds.Jatirejo	Sepeda, mainan anak-

			Kec.Ampelgading	anak
13.	Sujai	48	Rt.14/04 Ds.Banglarangan Kec.ampelgading	Kambing
14.	Rohyati	40	Rt.07/01 Ds.Jatirejo Kec.Ampelgading	Beras 1 Kwintal, gula pasir 10 kg, minyak goreng 20 kg
15.	Wasripah	36	Rt.04/10 Ds.Jatirejo Kec.Ampelgading	Beras 1 Kwintal, gula pasir 10 kg, minyak goreng 20 kg
16.	Winarti	44	Rt. 06/01 Ds.Jatirejo Kec.Ampelgading	Sepeda, sosis, nugget
17.	Sholihin	41	Rt.12/03 Ds.Karangtengah Kec.Ampelgading	Kambing
18.	Casmonah	34	Rt.03/04 Ds.Ampelgading Kec.Ampelgading	Kambing
19.	Nur Janah	33	Rt.12/03 Ds.Karangtengah Kec.Ampelgading	Mesin jahit dan perlengkapannya
20.	Fendy Maryle	37	Rt.15/05 Ds.Banglarangan Kec.Ampelgading	Kambing

Sumber: Dokumen Rizki Amalia, 6 Mei 2013

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pengemis

Pada dasarnya masalah sosial merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki. Oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya.

Sumber-sumber masalah sosial dapat timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, biologi, dan kebudayaan. Masalah-masalah sosial dapat berupa: masalah kemiskinan, kejahatan, masalah generasi muda, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup. Mereka yang tersingkirkan mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup dengan membanjiri sektor informal entah menjadi pemulung, pengamen, gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

Pada umumnya mereka kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dalam keadaan tersebut pengemis kebanyakan menjadi bagian integral dalam tata kehidupan masyarakat. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain (PP No. 31 Tahun 1980).

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa maraknya pengemis di kota Pemalang paling tidak disebabkan oleh 2 faktor yaitu: faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri sang peminta-minta yang meliputi sifat malas, tidak mau bekerja keras, mental yang tidak kuat, cacat fisik maupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi luar dari sang peminta-minta yang meliputi faktor sosial, kultur / kebudayaan, ekonomi, lingkungan, agama.

Faktor lain menyebutkan bahwa maraknya pengemis di kota Pemalang disebabkan oleh faktor: ekonomi, lanjut usia, cacat tubuh, rendahnya pendidikan, kurangnya ketrampilan kerja dan minimnya lapangan pekerjaan yang diperlukan oleh tenaga kerja tidak terampil dan tidak berpendidikan. Serta kurang efektifnya kegiatan penjaringan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang sehingga pengemis belum sepenuhnya terkena razia dikarenakan pengemis tersebut lepas, melarikan diri, bahkan bersembunyi ketika terjadi penjaringan. Sehingga menyebabkan mereka dapat beroperasi lagi dilain waktu. Penyebab lain karena adanya buangan pengemis-pengemis dan gelandangan dari luar daerah yang dibuang dan masuk ke Pemalang yang menyebabkan mereka kemudian beroperasi di daerah-daerah yang ada di Pemalang.

Menurut Daldjuni (1985) dalam Abdulsyani, bahwa masalah sosial dapat bertalian dengan masalah alami ataupun masalah pribadi,

maka secara menyeluruh ada beberapa sumber penyebab timbulnya masalah sosial, antara lain:

- a. faktor alam, hal ini menyangkut gejala menepisnya sumber daya alam. Penyebabnya dapat berupa tindakan overeksploitasi oleh manusia dengan teknologi yang makin maju, dapat pula karena semakin banyaknya jumlah penduduk yang secara otomatis cepat menipiskan persediaan sumber daya.
- b. faktor biologis, hal ini menyangkut pertumbuhan manusia. Pemandangan manusia yang dihubungkan dengan implikasi kesehatan dan kualitas lingkungan tempat tinggal, baik di pedesaan maupun di perkotaan.
- c. faktor budayawi, hal ini berkaitan dengan keguncangan mental dan bertalian dengan beraneka ragam penyakit kejiwaan. Pendorongnya adalah perkembangan teknologi.
- d. faktor sosial, hal ini menyangkut dengan berbagai kebijaksanaan ekonomi dan politik yang dikendalikan bagi masyarakat.

Kesimpulannya adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi luar dari sang peminta-minta yang meliputi faktor sosial, kultur / kebudayaan, ekonomi, lingkungan, dan agama hal ini sesuai dengan faktor-faktor penyebab timbulnya masalah sosial menurut Daldjuni (1985) dalam Abdulsyani bahwa masalah sosial dapat bertalian dengan masalah alami atau masalah pribadi yang

terdiri dari faktor alam, faktor biologis, faktor budayawi, dan faktor sosial.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I

Pandangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari bayang-bayang Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia digunakan sebagai dasar mengatur kehidupan negara kita. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang mengenai tata kehidupan bernegara harus didasarkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia digunakan sebagai penuntun, petunjuk dan pedoman hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang harus mencerminkan semua sila dari Pancasila.

Upaya penanggulangan pengemis sendiri memang merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, tidak hanya instansi pemerintahan saja namun juga perlu didukung oleh partisipasi warga masyarakat. Hal ini untuk menuju Pemalang yang bersih dari pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT). Dalam upaya penanggulangan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I partisipasi dari masyarakat cukup ikut

berpartisipasi. Partisipasi masyarakat terhadap kinerja Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” yang telah berlangsung dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I

No.	Partisipan	Bentuk Partisipasi	Fokus
1.	Warga masyarakat sekitar Balai	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikutsertakan penerima manfaat dalam kegiatan bina lingkungan. • Membantu memasarkan hasil kerajinan mereka di warung dan toko-tokonya. • Membantu manakala kelayan / penerima manfaat mengalami musibah. 	Penerima Manfaat
2.	Pemerintah Desa Ujunggede	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan petak tanah pemakaman khusus untuk warga balai. 	Penerima manfaat dan Balai Resos “Samekto Karti”
3.	Pengusaha konveksi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kesempatan kerja untuk penerima manfaat yang telah purna bina yang memiliki keahlian menjahit. 	Penerima manfaat
4.	Ibu-ibu Dharma Wanita (Persit)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sumbangan sembako. • Keterampilan memasak dan keterampilan membuat anyam- 	Penerima manfaat dan Balai Rehabilitasi

		anyaman.		Sosial “Samekto Karti”
5.	Perusahaan Sragi	Gula	Memberikan bantuan berupa sembako.	Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti”
6.	Instruktur senam		Memberikan bimbingan fisik berupa senam pagi setiap 1 bulan sekali.	Penerima manfaat
7.	Ibu-ibu PKK		Memberikan pelatihan Ekonomi Produktif dan keterampilan lain (memasak)	Usaha dan Eks PGOT

Tabel di atas menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I. Bentuk partisipasi masyarakat yang paling sering diberikan adalah bentuk partisipasi masyarakat berupa pemberian bantuan sembako baik dari perusahaan / pabrik maupun perkumpulan ibu-ibu Dharma Wanita. Serta bantuan untuk memasarkan hasil kerajinan tangan hasil karya dari penerima manfaat oleh masyarakat yang memiliki usaha warung ataupun toko.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I Untuk Merehabilitasi Pengemis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, usaha-usaha dalam upaya penanggulangan pengemis sebagai berikut:

- a. usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya pengemis. Usaha tersebut meliputi: penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pengemisan.
- b. usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud untuk mengurangi dan / atau meniadakan pengemis. Usaha tersebut meliputi: razia, penampungan sementara untuk diseleksi, pelimpahan.
- c. usaha rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir terhadap pengemis melalui usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Dalam upayanya mewujudkan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang semakin mandiri dan sejahtera, Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I melakukan upaya-upaya rehabilitasi guna merubah kehidupan bagi para pengemis. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. rehabilitasi perilaku

proses rehabilitasi sosial melalui pelayanan perubahan perilaku baik berupa pendidikan bela negara maupun bimbingan mental berupa pembinaan keagamaan, dinamika kelompok, dan terapi kelompok.

2. rehabilitasi sosial psikologi

proses rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin mengembalikan kondisi mental psikologi dan sosial agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

3. rehabilitasi karya

proses rehabilitasi sosial yang berusaha untuk mengupayakan agar sasaran penanganan dapat menjadi manusia produktif sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

4. rehabilitasi pendidikan

proses rehabilitasi yang berusaha untuk mengupayakan penambahan pengetahuan melalui *upgrading* dan *refreshing* untuk menentukan jenis ketrampilan.

Adapun mekanisme kerja dari Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I sebagai berikut:

a. tahap pendekatan awal

kegiatan pada tahap ini antara lain: orientasi dan observasi yang melibatkan pekerja sosial masyarakat, identifikasi guna mendapatkan data dan identitas calon penerima manfaat, motivasi dan penyuluhan, serta seleksi calon penerima manfaat.

b. tahap penerimaan

kegiatan dalam tahap ini adalah: registrasi yaitu melakukan pencatatan penerima manfaat secara akurat oleh petugas, *assessment* / pengungkapan masalah dilakukan untuk mendapatkan data masalah dari penerima manfaat, dan penempatan program pelayanan Balai kepada penerima manfaat.

c. tahap bimbingan sosial & ketrampilan

kegiatan ini terdiri dari:

- 1) bimbingan fisik, mental dan sosial
- 2) bimbingan ketrampilan kerja

d. tahap bimbingan lanjut

kegiatan ini terdiri dari:

- 1) bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat & peran serta dalam pembangunan
- 2) bimbingan pengembangan usaha / kerja
- 3) bimbingan pemantapan peningkatan usaha

e. tahap resosialisasi

- 1) bimbingan kesiapan & peran serta masyarakat
- 2) bimbingan sosial hidup bermasyarakat
- 3) bimbingan pembinaan bantuan / stimulan
- 4) bimbingan usaha / kerja produktif
- 5) bimbingan penempatan & penyaluran

Sesuai dengan sifatnya yang rehabilitatif, maka dalam upaya rehabilitasinya, perlu diadakan langkah-langkah dalam pelaksanaan rehabilitasi. Soetomo menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan rehabilitasi sebagai berikut:

a. tahap identifikasi

tahap identifikasi dilakukan untuk membuka kesadaran dan keyakinan bahwa dalam kehidupan masyarakat terkandung gejala masalah sosial. Kondisi ini membawa kerugian baik secara fisik maupun nonfisik pada individu, kelompok dan masyarakat, serta bertentangan dengan norma, nilai, dan standar sosial.

b. tahap diagnosis

setelah masalah sosial teridentifikasi maka akan mendorong munculnya respon berupa tindakan untuk memecahkan masalah. Tahap diagnosis dilakukan untuk upaya mencari dan mempelajari latar belakang masalah, faktor yang terkait dan terutama faktor yang menjadi penyebab.

c. tahap *treatment*

tahap *treatment* atau upaya pemecahan masalah adalah apabila dapat menghapus atau menghilangkan masalahnya dari realitas kehidupan sosial. Namun *treatment* tidak harus diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan masalah sosial, akan tetapi dapat mengurangi atau mengatasi perkembangan masalah.

Dari beberapa upaya-upaya dan tahapan-tahapan yang dijelaskan diatas, upaya yang paling sering di lakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I dan yang efektif dilakukan adalah upaya Rehabilitasi Perilaku dan upaya Rehabilitasi Karya. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut terdiri dari tahap bimbingan sosial dan keterampilan berupa bimbingan fisik dan mental sosial serta bimbingan keterampilan kerja. Di samping itu juga dilakukan pula tahap Bimbingan Lanjut dan tahap Bimbingan Resosialisasi guna memantau hasil dari bimbingan yang telah diberikan ketika mereka menerima pelatihan di balai. Tahap Bimbingan Lanjut dan tahap Bimbingan Resosialisasi dilakukan setelah penerima manfaat tidak lagi mendapatkan bimbingan / purna bina.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengemis di Kota Pematang Siantar disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri sang peminta-minta yang meliputi sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, cacat fisik maupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi luar dari sang peminta-minta yang meliputi faktor sosial, kultur, ekonomi, pendidikan, lingkungan dan agama. Faktor lain karena kurang efektifnya kegiatan penjangkauan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) yang dilakukan Satpol PP sehingga pengemis belum sepenuhnya terkena razia. Penyebab lain karena adanya buangan pengemis-pengemis dan gelandangan dari luar daerah yang dibuang dan masuk ke Pematang Siantar yang menyebabkan mereka kemudian beroperasi di daerah-daerah yang ada di Pematang Siantar.
2. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" berupa: pemberian bantuan berupa sandang pangan dalam bentuk sembako serta bimbingan ketrampilan oleh kelompok-kelompok masyarakat, LSM, persatuan ibu-ibu Dharma Wanita, serta perusahaan atau pabrik-pabrik. Pemberian bantuan

pertolongan oleh warga masyarakat manakala kelayan Balai mengalami musibah misalnya meninggal dunia. Pemberian bimbingan fisik berupa senam pagi oleh instruktur senam. Membantu memasarkan hasil kerajinan tangan dari penerima manfaat. Membantu menyalurkan kerja bagi penerima manfaat yang telah purna bina dengan memberikan pekerjaan di industri-industri konveksi. Memberikan pelatihan Usaha Ekonomi Produktif melalui kegiatan bimbingan, latihan ketrampilan dan pendampingan sosial bagi eks PGOT.

3. Upaya-upaya rehabilitasi pengemis yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang I antara lain: 1) rehabilitasi perilaku yang merupakan bagian dari proses rehabilitasi sosial melalui pelayanan perubahan perilaku baik berupa pendidikan bela Negara maupun bimbingan mental; 2) rehabilitasi sosial psikologi merupakan bagian dari proses rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin mengembalikan kondisi mental psikologi dan sosial. Kegiatan ini berupa pemberian bimbingan materi tentang etika dan moral oleh petugas Balai; 3) rehabilitasi karya merupakan bagian dari rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan agar sasaran penanganan dapat menjadi manusia produktif dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan; 4) rehabilitasi pendidikan juga merupakan bagian dari rehabilitasi sosial yang berusaha mengupayakan penambahan pengetahuan melalui *upgrading* dan *refreshing* untuk pengambilan dan menentukan bentuk jenis

ketrampilan. Kegiatan rehabilitasi ini memberikan kebebasan kepada penerima manfaat untuk memilih jenis kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka inginkan.

B. SARAN

Berdasarkan temuan di lapangan dan kesimpulan yang telah di kemukakan diatas, maka dapat ditarik beberapa saran yaitu:

1. Petugas di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I dalam memberikan pelayanan dan bimbingan terhadap penerima manfaat agar jumlah tenaga ahli profesional bidang pekerja sosial dapat ditambahkan lagi. Selain itu alokasi dana operasional sebaiknya juga untuk pembangunan sarana dan prasarana Balai yang dirasa belum terpenuhi. Serta diharapkan lebih meningkatkan keragaman ketrampilan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” agar penerima manfaat mempunyai bekal ketrampilan yang lebih memadai dan berguna.
2. Pelatihan dan bimbingan yang diberikan di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I ini harus dijadikan motivasi bagi penerima manfaat untuk lepas dari masalah sosial yang dialami.
3. Agar masyarakat lebih ikut berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi pengemis yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I, karena dalam upaya tersebut tidak hanya tugas dari Dinas-Dinas Pemerintahan saja, namun perlu adanya partisipasi dari

masyarakat agar upaya rehabilitasi yang diberikan kepada penerima manfaat dapat berjalan lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd'rachim, E.A. 2009. *Kemiskinan dan Pengangguran*. Jakarta: Nobel Edumedia.
- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Sistematis, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial. *Modul Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Panti*. Yogyakarta: Dinsos Panti Sosial Bina Karya.
- Dirjen Rehabilitasi Sosial RI. 2011. *Program Desaku Menanti: Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis terpadu Berbasis Desa*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- Fadhil Nurdin, M., *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Angkasa, 1990.
- Firmansyah, Yogie. 2012. *Peran Unit Rehabilitasi Sosial "KARYA MANDIRI" Kabupaten Pemalang dalam Pemerataan Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah*. Skripsi: Unnes.
- Kartono, Kartini. 2007. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Mertoprawiro, Soedarsono. 1982. *Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miles, Matthew B.dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Terjemahan: Tjetjep Rohendi R)*. Jakarta: UI-Press.
- Moeljatno. 2007. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexi. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muryani, Tri. 2008. *Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga.

- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rustopo dan AT. Soegito. 2006. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Dalam Satu Naskah dan Analisis Singkat*. Semarang: UNNES Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- Yuwono, Dandung Budi. 2004. *Pengemis Dalam Ruang Sosial Muslim*. Dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.XIII, No.3 September-Desember. Hal. 442-465.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I

INSTRUMEN PENELITIAN

REHABILITASI PENGEMIS DI KOTA PEMALANG

NO.	FOKUS PENELITIAN	INDIKATOR	PERTANYAAN	INFORMAN
1.	Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pengemisan di Kota Pemalang	Latar belakang melakukan pengemisan	1) Sejak kapan anda menjadi pengemis? 2) Apa alasan anda menjadi pengemis? 3) Apakah anda masih memiliki keluarga? 4) Bagaimana pendapat dari keluarga anda melihat anda menjadi pengemis? 5) Anda biasa mangkal dimana? 6) Pernahkah anda mendapatkan masalah yang menakutkan bagi anda?	Pengemis / Penerima Manfaat

			<p>7) Pernahkah anda terkena razia?</p> <p>8) Bagaimana perasaan anda apabila hal itu terjadi terhadap anda?</p> <p>9) Menurut anda, bagaimana perasaan anda selama tinggal di Balai Resos “Samekto Karti” ini?</p> <p>10) Menurut anda, bagaimana dengan bimbingan dan pelatihan yang diberikan disini?</p> <p>11) Apakah penanganan tersebut bermanfaat atau justru mengganggu anda?</p> <p>12) Apa harapan anda setelah keluar dari</p>	
--	--	--	--	--

			Balai Resos “Samekto Karti”?	
2.	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pengemis di Kota Pemalang	Opini masyarakat tentang penanggulangan pengemis	<p>1) Apakah anda tahu apa itu pengemis?</p> <p>2) Pernah bertemu, melihat atau memberi uang kepada pengemis?</p> <p>3) Pengemis itu perlu dikasihani, biasa saja atau justru sebagai pengganggu masyarakat?</p> <p>4) Menurut anda apa yang semestinya dilakukan pada mereka?</p> <p>5) Apakah anda tahu tentang upaya penanganan rehabilitasi pengemis?</p> <p>6) Kalau anda tentang</p>	Masyarakat

			<p>penanganan rehabilitasi pengemis, bagaimana pendapat anda? Hal tidak perlu atau harus dilanjutkan dan ditingkatkan?</p> <p>7) Menurut anda, apakah ada bedanya pengemis yang telah mendapatkan penanganan rehabilitasi dibandingkan dengan yang tidak, bagaimana alasannya?</p> <p>8) Apakah harapan anda terhadap pengemis dan upaya penanganan rehabilitasinya?</p>	
3.	Upaya-upaya yang dilakukan untuk	<ul style="list-style-type: none"> Latar belakang penanganan 	1) Berapa jumlah pengemis yang ada di wilayah	Pimpinan Dinas Sosial Kabupaten

	<p>merehabilitasi pengemis di Kota Pematang</p>	<p>pengemisan di Kota Pematang oleh Balai rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pematang I, Dinas Sosial Kabupaten Pematang dan pihak-pihak lain yang terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visi misi penanganan • Bentuk penanganan • Hasil penanganan 	<p>kota Pematang?</p> <p>2)Apakah setiap tahun jumlahnya cenderung bertambah atau berkurang?</p> <p>3)Bagaimana pandangan anda tentang pengemis di Pematang?</p> <p>4)Menurut anda, apa alasan mereka melakukan pengemisan?</p> <p>5)Apa tindakan pemerintah Kabupaten Pematang dalam menangani pengemisan?</p> <p>6)Apakah yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan pengemisan di Pematang</p>	<p>Pematang</p>
--	---	--	--	-----------------

			<p>ini?</p> <p>7) Bagaimana hasil penanganan tersebut?</p> <p>8) Dinas sosial bekerjasama dengan pihak mana saja?</p> <p>9) Bagaimana dengan partisipasi masyarakatnya sendiri?</p> <p>10) Apa peran Dinas Sosial dalam penanganan rehabilitasi pengemis melalui pihak tersebut?</p> <p>11) Apakah pihak tersebut akan mampu menyelesaikan atau mengurangi permasalahan pengemisan di Pematang?</p> <p>12) Sejauh ini</p>	
--	--	--	---	--

			<p>apakah pihak tersebut sudah menunjukkan hasil dan kinerja dengan baik?</p> <p>13) Apa harapan anda untuk permasalahan ini?</p> <p>1) Sejak kapan anda bekerja di unit rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti?</p> <p>2) Apa tugas, peran dan wewenang anda di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti ini?</p> <p>3) Apa yang melatarbelakangi berdirinya unit rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi</p>	<p>Petugas Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti</p>
--	--	--	--	--

			<p>sosial Samekto Karti ini?</p> <p>4) Apa visi misinya?</p> <p>5) Untuk dana operasional unit rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto karti didapat dari siapa saja?</p> <p>6) Apa dan bagaimana program dan target pencapaian programnya?</p> <p>7) Bagaimana hubungan Balai Rehabilitasi Sosial dan pihak lain yang mempunyai kepentingan, misalkan dengan Dinas Sosial?</p> <p>8) Selama ini apa tantangan atau gangguan</p>	
--	--	--	---	--

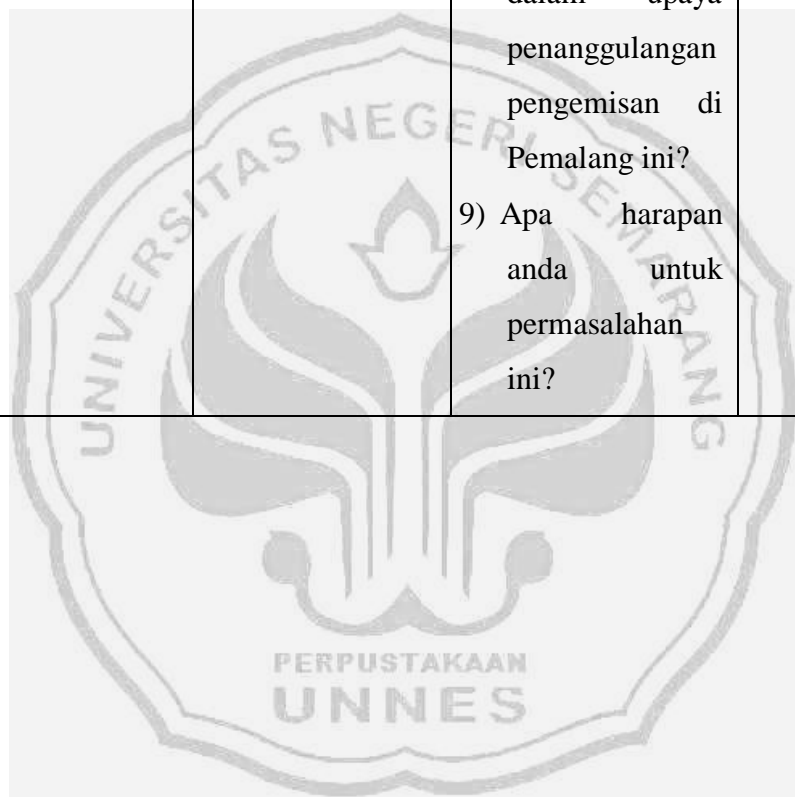
			<p>dalam penanganan rehabilitasi pengemis?</p> <p>9) Saai tini ada berapa orang yang dibina di unit rehabilitasi sosial Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti ini?</p> <p>10) Bagaimana latarbelakang mereka ada disini?</p> <p>11) Faktor apa saja yang menyebabkan mereka melakukan pengemisian?</p> <p>12) Menurut anda, bagaimana masa depan seorang pengemis?</p> <p>13) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi pengemis?</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Bagaimana langkah-langkah awalnya?</p> <p>14) Apakah setelah pengemis tersebut memperoleh penanganan rehabilitasi di unit rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti ada tindak lanjut dari unit rehabilitasi mengenai pencarian lapangan pekerjaan?</p> <p>15) Sejauh ini apakah unit rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti ini sudah menjalankan peran dan kinerjanya dengan baik?</p>	
--	--	--	--	--

			<p>16) Apakah yang anda harapkan dari pemerintah, masyarakat umum dan pengemis itu sendiri?</p> <p>17) Bagaimana partisipasi dari masyarakat selama ini?</p> <p>18) Apa harapan anda kedepan dengan adanya unit rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti sebagai lembaga yang memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pengemis?</p>	
			<p>1) Apakah yang anda ketahui tentang pengemis?</p> <p>2) Bagaimana</p>	Satpol PP

			<p>pendapat anda tentang mereka?</p> <p>3) Menurut pendapat anda, alasan apakah yang menjadikan mereka melakukan pengemisan? Apa saja faktor-faktor penyebabnya?</p> <p>4) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi pengemisan di Pemalang?</p> <p>5) Apakah ada kerjasama dengan pihak lain, misanya dengan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang?</p> <p>6) Bagaimana bentuk kerjasamanya?</p> <p>7) Bagaimana</p>	
--	--	--	---	--

			<p>partisipasi dari masyarakat sendiri? Adakah partisipasi dari mereka?</p> <p>8) Apakah yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan pengemisan di Pemalang ini?</p> <p>9) Apa harapan anda untuk permasalahan ini?</p>	
--	--	--	---	--



LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

REHABILITASI PENGEMIS DI KOTA PEMALANG

Pedoman Wawancara Untuk Pengemis

b. Identitas informan

- 1) Nama :
- 2) Jenis kelamin :
- 3) Usia :
- 4) Pendidikan :
- 5) Alamat :

c. Daftar pertanyaan

1. Sejak kapan anda menjadi pengemis?
2. Apa alasan anda menjadi pengemis?
3. Apakah anda masih memiliki keluarga?
4. Bagaimana pendapat dari keluarga anda melihat anda menjadi pengemis?
5. Anda biasa mangkal dimana?
6. Pernahkah anda mendapatkan masalah yang menakutkan bagi anda?
7. Pernahkah anda terkena razia?
8. Bagaimana perasaan anda apabila hal itu terjadi terhadap anda?
9. Menurut anda, bagaimana perasaan anda selama tinggal di Balai Resos “Samekto Karti” ini?
10. Menurut anda, bagaimana dengan bimbingan dan pelatihan yang diberikan disini?
11. Apakah penanganan tersebut bermanfaat atau justru mengganggu anda?
12. Apa harapan anda setelah keluar dari Balai Resos “Samekto Karti”?

PEDOMAN WAWANCARA

REHABILITASI PENGEMIS DI KOTA PEMALANG

Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat

a. Identitas informan

- 1). Nama :
- 2). Jenis kelamin :
- 3). Usia :
- 4). Pendidikan :
- 5). Pekerjaan :
- 6). Alamat :

b. Daftar pertanyaan

- 1) Apakah anda tahu apa itu pengemis?
- 2) Pernah bertemu, melihat atau memberi uang kepada pengemis?
- 3) Pengemis itu perlu dikasihani, biasa saja atau justru sebagai pengganggu masyarakat?
- 4) Menurut anda apa yang semestinya dilakukan pada mereka?
- 5) Apakah anda tahu tentang upaya penanganan rehabilitasi pengemis?
- 6) Kalau anda tentang penanganan rehabilitasi pengemis, bagaimana pendapat anda? Hal tidak perlu atau harus dilanjutkan dan ditingkatkan?
- 7) Menurut anda, apakah ada bedanya pengemis yang telah mendapatkan penanganan rehabilitasi dibandingkan dengan yang tidak, bagaimana alasannya?

Apakah harapan anda terhadap pengemis dan upaya penanganan rehabilitasinya?

PEDOMAN WAWANCARA

REHABILITASI PENGEMIS DI KOTA PEMALANG

Pedoman Wawancara Untuk Pimpinan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang

a. Identitas informan

- 1) Nama :
- 2) Jenis kelamin :
- 3) Usia :
- 4) Pendidikan :
- 5) Alamat :

b. Daftar pertanyaan

1. Berapa jumlah pengemis yang ada di wilayah kota Pemalang?
2. Apakah setiap tahun jumlahnya cenderung bertambah atau berkurang?
3. Bagaimana pandangan anda tentang pengemis di Pemalang?
4. Menurut anda, apa alasan mereka melakukan pengemisan?
5. Apa tindakan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menangani pengemisan?
6. Apakah yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan pengemisan di Pemalang ini?
7. Bagaimana hasil penanganan tersebut?
8. Dinas sosial bekerjasama dengan pihak mana saja?
9. Bagaimana dengan partisipasi masyarakatnya sendiri?
10. Apa peran Dinas Sosial dalam penanganan rehabilitasi pengemis melalui pihak tersebut?
11. Apakah pihak tersebut akan mampu menyelesaikan atau mengurangi permasalahan pengemisan di Pemalang?
12. Sejauh ini apakah pihak tersebut sudah menunjukkan hasil dan kinerja dengan baik?
13. Apa harapan anda untuk permasalahan ini?

PEDOMAN WAWANCARA

REHABILITASI PENGEMIS DI KOTA PEMALANG

Pedoman Wawancara Untuk Petugas Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti

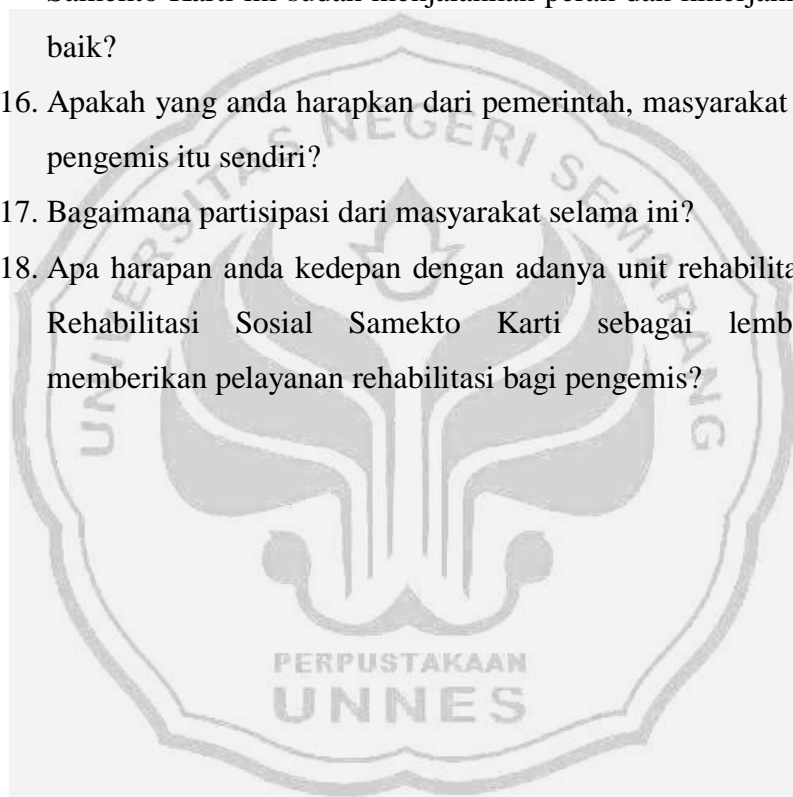
a. Identitas informan

- 1) Nama :
- 2) Jenis kelamin :
- 3) Usia :
- 4) Pendidikan :
- 5) Alamat :

b. Daftar pertanyaan

1. Sejak kapan anda bekerja di unit rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti?
2. Apa tugas, peran dan wewenang anda di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti ini?
3. Apa yang melatarbelakangi berdirinya unit rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi sosial Samekto Karti ini?
4. Apa visi misinya?
5. Untuk dana operasional unit rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto karti didapat dari siapa saja?
6. Apa dan bagaimana program dan target pencapaian programnya?
7. Bagaimana hubungan Balai Rehabilitasi Sosial dan pihak lain yang mempunyai kepentingan, misalkan dengan Dinas Sosial?
8. Selama ini apa tantangan atau gangguan dalam penanganan rehabilitasi pengemis?
9. Saai ini ada berapa orang yang dibina di unit rehabilitasi sosial Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti ini?
10. Bagaimana latarbelakang mereka ada disini?
11. Faktor apa saja yang menyebabkan mereka melakukan pengemisan?
12. Menurut anda, bagaimana masa depan seorang pengemis?

13. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi pengemis? Bagaimana langkah-langkah awalnya?
14. Apakah setelah pengemis tersebut memperoleh penanganan rehabilitasi di unit rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti ada tindak lanjut dari unit rehabilitasi mengenai pencarian lapangan pekerjaan?
15. Sejauh ini apakah unit rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti ini sudah menjalankan peran dan kinerjanya dengan baik?
16. Apakah yang anda harapkan dari pemerintah, masyarakat umum dan pengemis itu sendiri?
17. Bagaimana partisipasi dari masyarakat selama ini?
18. Apa harapan anda kedepan dengan adanya unit rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti sebagai lembaga yang memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pengemis?



PEDOMAN WAWANCARA

REHABILITASI PENGEMIS DI KOTA PEMALANG

Pedoman Wawancara Untuk Satpol PP

a. Identitas informan

- 1) Nama :
- 2) Jenis kelamin :
- 3) Usia :
- 4) Pendidikan :
- 5) Alamat :

b. Daftar pertanyaan

1. Apakah yang anda ketahui tentang pengemis?
2. Bagaimana pendapat anda tentang mereka?
3. Menurut pendapat anda, alasan apakah yang menjadikan mereka melakukan pengemisan? Apa saja faktor-faktor penyebabnya?
4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi pengemisan di Pemalang?
5. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang?
6. Bagaimana bentuk kerjasamanya?
7. Bagaimana partisipasi dari masyarakat sendiri? Adakah partisipasi dari mereka?
8. Apakah yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan pengemisan di Pemalang ini?
9. Apa harapan anda untuk permasalahan ini?

LAMPIRAN 3

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)

NOMOR 31 TAHUN 1980 (31/1980)

TENTANG

PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan;
- b. bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan/atau pengemis, agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia;
- c. berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
2. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
3. Menteri adalah Menteri Sosial.
4. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya :

- a. pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
 - b. meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
 - c. pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.
5. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
6. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

Penanggulangan gelandangan dan pengemisan yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

Pasal 3

- (1) Kebijakan di bidang penanggulangan gelandangan dan pengemis ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan, Menteri dibantu oleh sebuah badan koordinasi, yang susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijakan khusus berdasarkan kondisi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis dari Menteri Sosial dan petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri.

BAB III

USAHA PREVENTIF

Pasal 5

Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.

Pasal 6

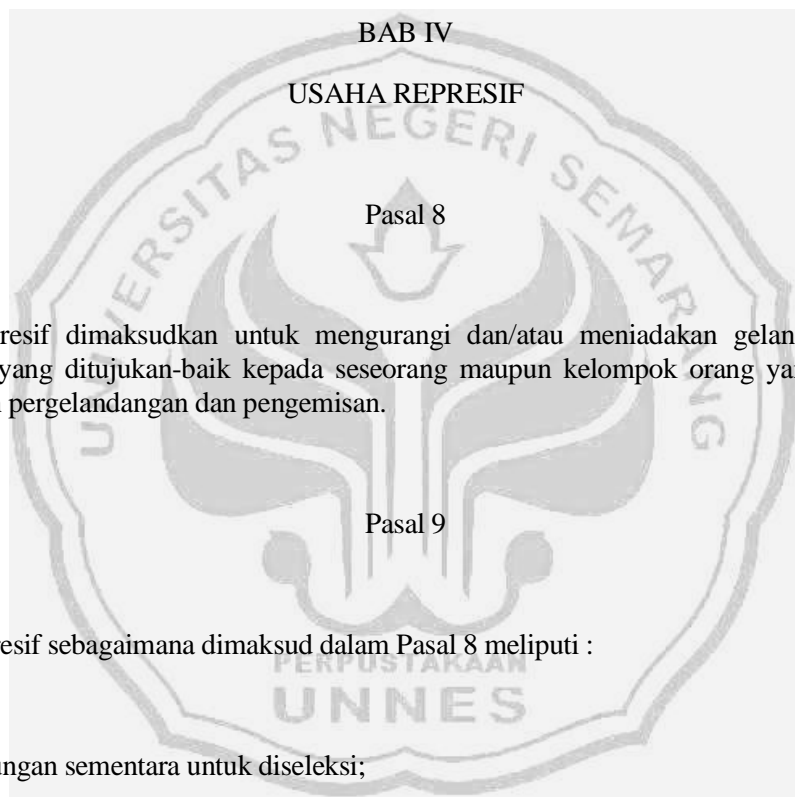
Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan antara lain dengan:

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. Pembinaan sosial;
- c. Bantuan sosial;
- d. Perluasan kesempatan kerja;
- e. Pemukiman lokal;

f. Peningkatan derajat kesehatan.

Pasal 7

Pelaksanaan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.



Pasal 10

- (1) Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara terbatas.

- (2) Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang kepolisian terbatas dilaksanakan bersama-sama dengan Kepolisian.

Pasal 11

Gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.

Pasal 12

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :

- a. dilepaskan dengan syarat ;
- b. dimasukkan dalam Panti Sosial
- c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
- d. diserahkan ke Pengadilan;
- e. diberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Dalam hal seseorang gelandangan dan/atau pengemis dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya baik karena hasil seleksi maupun karena putusan pengadilan dapat diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

USAHA REHABILITATIF

Pasal 14

Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Pasal 15

(1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui Panti Sosial.

(2) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Usaha penampungan ditujukan untuk meneliti/menseleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.

Pasal 17

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.

Pasal 18

Usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

Pasal 19

Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta ketrampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pasal 20

Tatacara pelaksanaan penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Usaha penyaluran ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan dan ketrampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi dan jasa, melalui jalur-jalur transmigrasi swakarya, dan pemukiman lokal.
- (2) Tatacara pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 22

Usaha tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis.

Pasal 23

Usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain dilakukan dengan :

- a.meningkatkan kesadaran berswadaya;
- b.memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi;
- c.menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Pasal 24

Pelaksanaan usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

Organisasi Sosial masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi gelandangan dan pengemis dengan mendirikan Panti Sosial.

Pasal 26

Organisasi Sosial yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib mendaftarkan dan memberikan laporan berkala kepada Menteri melalui Instansi dalam lingkungan Departemen Sosial setempat.

Pasal 27

Menteri dapat memberikan bantuan/subsidi kepada Organisasi Sosial Masyarakat yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi gelandangan dan pengemis.

Pasal 28

Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap organisasi sosial masyarakat yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi gelandangan dan pengemis.

Pasal 29

Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam bab ini diatur oleh Menteri.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 30

Segala peraturan perundang-undangan tentang gelandangan dan pengemis yang sudah ada tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 31

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 1980

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO,SH.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1980
TENTANG
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

UMUM

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) menyatakan "Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila".

Keadaan tersebut hanya akan tercapai dengan baik apabila keadaan masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata.

Adalah merupakan kenyataan, bahwa keadaan sosial ekonomi yang belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berakibat meningkatnya gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar.

Masalah gelandangan dan pengemis adalah merupakan salah satu masalah sosial, yang antara lain sebagai akibat sampingan dari proses pembangunan Nasional, maka penanggulangan perlu dikoordinasikan dalam program-program lintas sektoral, regional, dengan pendekatan yang menyeluruh baik antar profesi maupun antar instansi disertai partisipasi aktif dari masyarakat (koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi).

Maksud Pemerintah mengikut sertakan partisipasi masyarakat, agar dapat ditingkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab, sosial masyarakat, sehingga potensi yang ada dalam masyarakat dapat berperan untuk menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis.

Agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kesimpang siuran dan dapat berjalan dengan lancar, maka perlu untuk memberikan penegasan aparat (instansi) yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam bidang penanggulangan gelandangan dan pengemis yang berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada Menteri Sosial.

Peraturan Pemerintah ini menekankan pada sasaran pokok dalam usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis yaitu :

1. Perorangan maupun kelompok masyarakat yang yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.
2. Keseluruhan gelandangan dan pengemis, baik yang masih memiliki potensi dan kemampuan untuk direhabilitasikan maupun yang mengalami masalah atau gangguan jasmaniah, rohaniah dan atau sosial yang bersifat kronis.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kebijaksanaan dalam pasal ini dapat berupa pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, sebagai usaha pengendalian terhadap usaha-usaha penanggulangan sehingga dapat mencapai tujuan yang sebaik-baiknya.

Ayat (2)
Gelandangan dan pengemis adalah merupakan salah satu masalah yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial yang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, penanggulangannya merupakan sebagian dari tugas pokok Departemen Sosial.

Namun demikian mengingat pergelandangan dan pengemis disebabkan oleh keadaan yang berbeda-beda, maka agar usaha penanggulangan dapat berhasil, Menteri Sosial perlu dibantu oleh suatu badan koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur Departemen /Lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan usaha-usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis. Selanjutnya dalam usaha rehabilitasi gelandangan dan pengemis, Departemen Sosial memerlukan kerjasama dengan Instansi Departemen lain, misalnya :

- a. Pendidikan di bidang mental dengan Departemen Agama;
- b. Pendidikan di bidang pertanian dengan Departemen Pertanian;
- c. Pendidikan di bidang ketrampilan dan penempatan /penyaluran dengan Departemen Tenaga Kerja dan Tranmigrasi

Pasal 4

Bahwasanya masalah gelandangan dan pengemis di daerah-daerah mempunyai latar belakang dan situasi yang berbeda. Oleh karena itu dalam usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis, kepada Pemerintah Daerah perlu diberi wewenang kebijaksanaan khusus sehingga dapat menerapkan rencana dan usahanya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Dalam rangka Penyuluhan dan Bimbingan Sosial serta Pembinaan Sosial perlu ditekankan masalah kebersihan, ketertiban, sosial, dan keserasian lingkungan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Pengertian "pelimpahan" dalam hal ini dimaksudkan karena usaha represif bagi gelandangan dan pengemis ada yang langsung ditandatangani oleh Departemen Sosial, yaitu bagi mereka yang masih memungkinkan untuk direhabilitasikan, tetapi bagi mereka yang diduga melakukan suatu pidana, penyelesaiannya diserahkan ke Pengadilan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk itu adalah petugas Kepolisian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yang diberi wewenang kepolisian terbatas adalah petugas Satuan Pengamanan (Satpam) Sosial.

Pasal 11

Penampungan sementara dimaksudkan sebagai tindakan sementara sampai selesainya seleksi.

Pasal 12

Pada umumnya timbulnya gelandangan dan pengemis diakibatkan oleh tekanan ekonomis, dengan mempunyai latar belakang permasalahan yang berbeda - beda diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga mereka jadi gelandangan dan pengemis itu dilakukan dalam keadaan terpaksa satu dan lain hal untuk mempertahankan hidupnya.

Mengingat tujuan utama usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah agar mereka kembali menjadi Warganegara yang berguna bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan terhadap gelandangan dan pengemis, berupa :

- a. dilepaskan dengan syarat;
- b. dimasukkan dalam Panti Sosial apabila menurut pertimbangan pejabat yang bersangkutan akan lebih baik dan menguntungkan bagi dirinya daripada diserahkan ke Pengadilan;
- c. dikembalikan ke dalam masyarakat, antara lain kepada orang tua/wali/keluarga, ke tempat asal, dipekerjakan dan sebagainya menurut bakat dan kemampuan masing-masing;
- d. penyerahan ke Pengadilan bagi yang diduga melakukan penggelandangan dan pengemis sebagai mata pencahariannya dan atau yang diduga telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, sehingga perlu ada keputusan Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Penampungan disini dimaksudkan penampungan sementara dalam asrama untuk diberi pendidikan, ketrampilan kerja, dan sebagainya.

Pengertian seleksi, dalam pasal ini berada dengan pengertian seleksi di dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Seleksi dalam pasal ini dimaksudkan untuk menentukan terapie sosial dengan bakat dan kemampuannya. Pengertian tidak lanjut adalah pembinaan lanjut ("aftercare") sesudah penyaluran.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

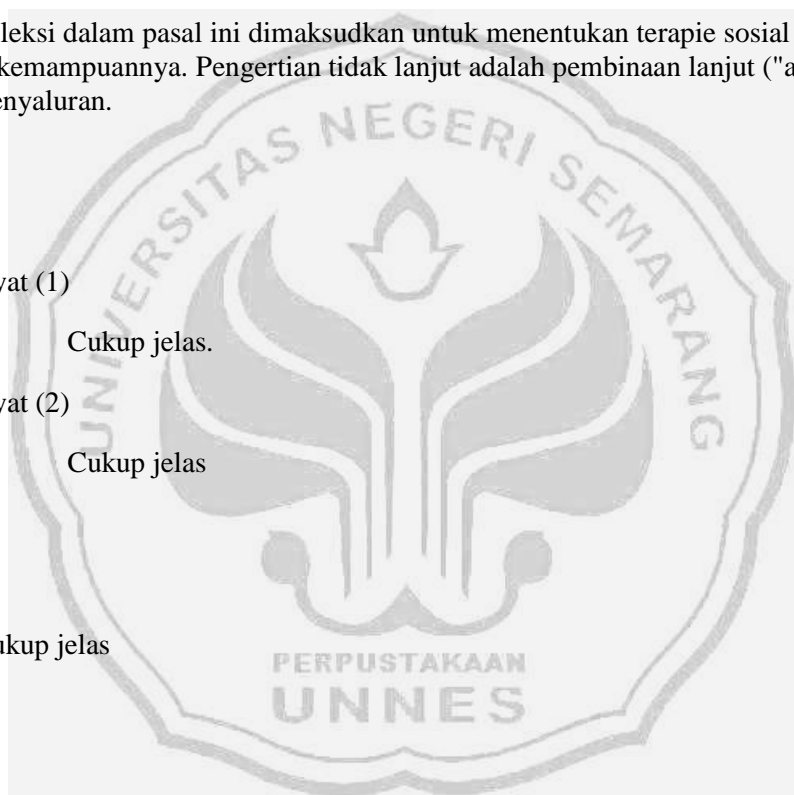
Cukup jelas

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Cukup jelas



Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Swakarya, ialah suatu usaha rehabilitasi sosial melalui pendidikan mental, sosial, dan ketrampilan kerja guna mengembalikan fungsi sosialnya sehingga setelah mereka dikembalikan ke daerah asal mereka dalam waktu relatif singkat dapat menolong diri sendiri secara swakarya untuk berswasembada.

Untuk berhasilnya usaha tersebut perlu adanya kerjasama secara terpadu antar instansi Pemerintah dan masyarakat.

Pemukiman lokal, ialah suatu usaha rehabilitasi sosial melalui pendidikan mental, sosial, dan ketrampilan kerja guna mengembalikan fungsi sosialnya, sehingga dalam pemukimannya dalam waktu singkat bisa berdiri sendiri.

Dalam hal ini perlu adanya suatu usaha secara terpadu antara Departemen Sosial dengan Instansi-Instansi Pemerintah di daerah, sehingga kebutuhan areal pemukiman, tambahan pembiayaan dan lain-lain fasilitas serta pembinaan lebih lanjut akan mendapatkan dukungan secara bersama.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan usaha tindak lanjut dilakukan oleh Menteri berdasarkan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 25

Cukupjelas

Pasal 26

Kewajiban untuk mendaftarkan dan memberikan laporan, dimaksudkan agar usaha-usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh masyarakat dapat diawasi dan diarahkan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 27

Pemberian subsidi/bantuan, dimaksudkan untuk memberikan dorongan agar organisasi sosial masyarakat lebih meningkatkan usahanya.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.



LAMPIRAN 4



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 1192/UN37.1.3./LT/2013

22 MAR 2013

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti"

Kabupaten Pemalang

di

Kabupaten Pemalang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Izin Pelaksanaan Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Rizki Amalia
NIM	: 3301409037
Semester	: VIII (delapan)
Jurusan	: Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)
Judul Skripsi	: Rehabilitasi Pengemis di Kota Pemalang
Alokasi Waktu	: Maret s.d Mei 2013

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga/Instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an Dekan
Bantuan Dekan Bid. Akademik,

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :

1. Dekan
 2. Ketua Jurusan PKn
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
- FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00

LAMPIRAN 5



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL
BALAI REHABILITASI SOSIAL “SAMEKTO KARTI”
PEMALANG I**

Jl. Pabrik Comal Baru – Ujunggede - Ampelgading – Pemalang
Telp. / Fax (0285) 577107 Kode Pos 52364
Website : <http://dinsos.jatengprov.go.id> E-mail : dinsosjateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0.74.11.02.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ign. AGUS APRIJANTO, S. Sos, MM.
NIP : 19620822 198303 1 009
Jabatan : Kepala Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang I

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZKI AMALIA
NIM : 3301409037
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti Pemalang I untuk penyusunan Skripsi dengan judul “Study Kasus Rehabilitasi Pengemis di Kota Pemalang” dari bulan Maret s/d April 2013.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 23 April 2013

a.n. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Kepala Balai Resos
“Samekto Karti” Pemalang I

Ign. AGUS APRIJANTO, S. Sos, MM.

Pembina
NIP. 19620822 198303 1 009

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Semarang;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.